



PROYEK PERUBAHAN

AMOURAS TRANSFORMASI MONITORING DAN AUDIT DIGITAL DALAM MITIGASI RISIKO PELAKSANAAN PROGRAM KEMENTERIAN PERTANIAN

Nama : Tin Latifah
NDH : A_28
NIP : 19740918 199903 2 002
Instansi : Kementerian Pertanian

**KEMENTERIAN PERTANIAN BEKERJASAMA DENGAN
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
PELATIHAN KEPEMIMPINAN NASIONAL TINGKAT II ANGKATAN XVII
TAHUN 2020**

HALAMAN PERSETUJUAN

LAPORAN AKHIR PROYEK PERUBAHAN

Nama Peserta : Tin Latifah, SP, M.Si
Nomor Daftar Hadir : 28
Instansi : Inspektorat II,
Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian
Judul : Transformasi Monitoring dan Audit Digital dalam
Mitigasi Risiko Pelaksanaan Program Kementerian
Pertanian

**TELAH DISEMINARKAN DAN DISETUJUI
PADA SEMINAR PROYEK PERUBAHAN.**

Menyetujui,

Bogor, 4 Desember 2020

Mentor/Atasan Langsung
Plt. Inspektur jenderal



Ir. Bambang, MM.
NIP.196511081991031001

Penguji



Ir. Razilu, M.Si
NIP.196511281991031002

Pembimbing/ Coach



Dr. P.M Marpaung, M.Sc
NIP.1960053011987031001

SURAT PERNYATAAN

1. Peserta Pelatihan

Kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Tin Latifah
Jabatan : Inspektur II
Instansi : Inspektorat II, Inspektorat Jenderal
Kementerian Pertanian

Adalah peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XVII Tahun 2020 di Pusat Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian (PPMKP) Ciawi - Bogor.

2. Pejabat Pembina Kepegawaian /Pejabat yang Ditunjuk

Kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Ir. Bambang, MM
Jabatan : Plt. Inspektur Jenderal
Instansi : Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian

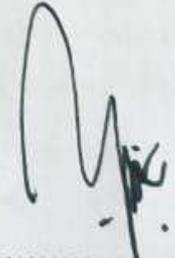
Proyek Perubahan peserta PKN Tingkat II Angkatan XVII Tahun 2020 merupakan produk pembelajaran individual yang menjadi salah satu indikator pencapaian hasil pelatihan. Proyek perubahan ini akan diimplementasikan di instansi kami dalam milestone jangka menengah yaitu pada bulan Januari s.d. Desember 2021, dan jangka panjang pada Januari s.d. Desember 2022.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan segala konsekuensinya.

Ciawi, Desember 2020


(Tin Latifah)

Mengetahui,


(.....)

RINGKASAN EKSEKUTIF

Transformasi Monitoring dan Audit Digital Dalam Mitigasi Risiko Pelaksanaan Program Kementerian Pertanian

Tin Latifah, SP, M.Si

Inspektorat Jenderal sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) di Kementerian Pertanian memiliki peran yang sangat strategis dalam mendukung keberhasilan pembangunan pertanian antara lain memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah. Kegiatan pengawasan Inspektorat Jenderal selama ini berbasis data manual, yang memiliki beberapa kelemahan dalam pelaksanaan pengawasan, sehingga digitalisasi data pengawasan menjadi solusi terbaik.

Proyek perubahan “Transformasi Monitoring dan Audit Digital dalam Mitigasi Risiko Pelaksanaan Program Kementerian Pertanian”. merupakan salah satu upaya yang diharapkan mampu meningkatkan kualitas pengawasan dengan memanfaatkan teknologi informasi modern, sehingga memungkinkan auditor menghasikan laporan audit secara berkala tanpa harus menunggu proses audit di akhir periode anggaran. Proses audit berjalan secara simultan bersamaan dengan eksekusi kegiatan yang dilakukan. Metode ini juga diharapkan menjadi early warning bagi manajemen berupa informasi awal tentang masalah yang terjadi, penyebab hakiki, serta solusi yang dapat ditempuh. Hal tersebut menjadi penting dimasa pandemi covid-19 karena keterbatasan sumber daya sedangkan kebutuhan penyediaan informasi dalam rangka pengambilan keputusan harus dilakukan dengan cepat.

Output dalam proyek perubahan ini adalah terbangunnya aplikasi Monitoring dan Digital Audit berbasis tabular dan spasial yang diberi nama AMOURAS, yaitu Audit and Monitoring Using Remote Sensing Tool Trough Automatic System, sedangkan outcome yang ingin dicapai adalah dikembangkannya aplikasi pada seluruh program strategis Kementerian Pertanian sehingga kegiatan monitoring dan audit di Inspektorat Jenderal atas kegiatan/program mitra kerja dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Bagi organisasi Inspektorat Jenderal, adanya transformasi metode pengawasan dari konvensional menjadi digital melalui pembangunan aplikasi AMOURAS, menunjukkan bahwa Inspektorat Jenderal merupakan organisasi pembelajar (learning organization), yaitu organisasi yang mampu untuk terus menerus melakukan proses pembelajaran mandiri (self learning) sehingga organisasi tersebut memiliki 'kecepatan berpikir dan bertindak' dalam merespon beragam perubahan yang muncul.

Proyek perubahan yang dilaksanakan melibatkan berbagai pihak, baik internal maupun eksternal, pusat maupun daerah, dan menyertakan pula

perubahan perilaku dan budaya kerja sehingga pelaksanaannya dibagi menjadi 3 (tiga) tahap, yaitu jangka pendek dengan rentang waktu 2 (dua) bulan, jangka menengah dengan rentang waktu 6 (enam) bulan dan jangka panjang dengan rentang waktu 12 (dua belas) sampai dengan 24 (dua puluh empat) bulan. Ruang lingkup perubahan yang ingin dicapai sebagai berikut:

1. Tersusunnya pedoman dan terbangunnya aplikasi pelaporan data pencapaian progres pelaksanaan setiap tahapan proses bisnis Program lingkup Kementan.
2. Aplikasi berbasis tabular dan spasial atas realisasi anggaran dan fisik Program lingkup Kementan.
3. Sistem pelaporan data yang terintegrasi dengan aplikasi pengawasan Inspektorat Jenderal.

Mengingat proyek perubahan ini dilakukan untuk memecahkan permasalahan organisasi Inspektorat Jenderal yang menghadapi keterlambatan data dan informasi terkait progress pelaksanaan kegiatan dan minimnya cakupan monitoring dan audit. Maka pembuatan aplikasi Monitoring dan Digital Audit dalam Rangka Mitigasi Risiko Pelaksanaan Program lingkup Kementan (AMOURAS) diharapkan sebagai inisiasi dan proyek percontohan untuk selanjutnya diterapkan pada seluruh program strategis Kementerian Pertanian.

Kata Pengantar

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Alloh SWT, karena atas Rahmat dan Hidayah-Nya, Proyek Perubahan dengan judul “Transformasi Monitoring dan Audit Digital dalam Mitigasi Risiko Pelaksanaan Program Kementerian Pertanian” telah dapat kami laksanakan. Laporan proyek Perubahan ini merupakan akumulasi dari implementasi tahapan kegiatan yang telah dipresentasikan dan disetujui oleh Plt. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian selaku Mentor dan mendapatkan saran masukan dari Narasumber.

Transformasi Monitoring dan Audit Digital dalam Mitigasi Risiko Pelaksanaan Program Kementerian Pertanian yang dilakukan berbasis aplikasi merupakan sebuah gagasan untuk meningkatkan peran Inspektorat Jenderal dalam melakukan monitoring dan audit dalam rangka mitigasi risiko pelaksanaan kegiatan guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kegiatan ini memerlukan partisipasi banyak pihak, keterlibatan *stakeholder* internal maupun eksternal merupakan hal yang sangat penting dalam mewujudkan pencapaian tujuan transformasi monitoring dan audit secara digital di lingkup Kementerian Pertanian secara efektif dan efisien. Laporan ini merupakan success story tentang bagaimana menggalang kerjasama dan dukungan, mulai dari merancang, membangun, melaksanakan gagasan proyek perubahan dan memantau perkembangan perubahan yang telah dibangun.

Adapun tahapan yang telah dilaksanakan pada kegiatan proyek perubahan ini antara lain:

1. Pembentukan Tim Efektif dan Tim Aplikasi sebagai tim kerja untuk melaksanakan setiap tahapan dalam proyek perubahan;
2. Penyusunan rencana kerja di internal Tim Efektif dan Tim Aplikasi Transformasi Monitoring dan Audit Digital dalam Mitigasi Risiko Pelaksanaan Program Kementerian Pertanian;
3. Koordinasi dengan *stakeholder* internal dan eksternal untuk mendapatkan dukungan pelaksanaan proyek perubahan;
4. Penyusunan, pembahasan dan pengesahan dokumen Proses Bisnis, Identifikasi dan Mitigasi Risiko Kegiatan;
5. Penyusunan, pembahasan, dan Pengesahan perangkat kebijakan berupa Pedoman Monitoring dan Audit Digital dan Draft Kebijakan Pengawasan;

6. Pembuatan aplikasi AMOURAS (*Audit and Monitoring Using Remote sensing tool through Authomatic System*); dan
7. *Soft Launching* coba aplikasi AMOURAS yang dilaksanakan pada minggu III bulan November 2020.

Keberhasilan dan ini tidak terlepas dari bimbingan dan bantuan berbagai pihak, untuk hal tersebut sudah pada tempatnya saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Adi Suryanto, M.Si selaku Kepala Lembaga Administrasi Negara dan seluruh jajarannya yang telah menyelenggarakan Program Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan XVII di Pusat Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) Kementerian Pertanian;
2. Dr. Bambang, M.Si selaku Mentor yang telah memberikan dukungan dan arahan kepada Penulis selama mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II.
3. Dr. P.M Marpaung, M.Sc selaku *Coach* atas ilmu, arahan dan bimbingan mulai dari perencanaan sampai dengan penyusunan laporan proyek perubahan ini;
4. Dr. Ir. Sumardjo Gatot Irianto, M.S., D.A.A. selaku pimpinan di Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian periode Maret – Oktober 2020 yang menugaskan kepada Penulis untuk mengikuti Program Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II sekaligus memberikan arahan dan bimbingan sehingga Penulis dapat menyelesaikan proyek perubahan ini;
5. Seluruh Pejabat Tinggi Madya dan Pejabat Tinggi Pratama lingkup Kementan yang telah memberikan dukungan kepada Penulis sehingga proyek perubahan ini dapat terlaksana;
6. Para Widyaiswara dan Isndstruktur yang telah memberikan materi pengajaran pada penyelenggaraan Program Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan XVII;
7. Seluruh stakeholder internal dan eksternal yang telah memberikan dukungan atas proyek perubahan;
8. Tim Efektif dan Tim Aplikasi yang selalu membantu Penulis untuk mewujudkan proyek perubahan ini;

9. Rekan peserta Program Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan XVII, Kelas A yang selalu memberikan masukan, dukungan, semoga silaturahmi kita tetap terjalin;
10. Suami dan anak-anakku yang selalu menjadi penyemangat dan pendukung utama dikala suka dan duka;
11. Pihak-pihak yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan.

Harapan Penulis kiranya Proyek Perubahan ini dapat bermanfaat terutama bagi Penulis sendiri, bagi Itjen Kementan, maupun bagi Kementerian Pertanian pada umumnya dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi kinerja Inspektorat Jenderal Kementan. Sebagai bentuk keberlanjutan peningkatan kualitas proyek perubahan ini, saran dan masukan yang positif selalu Penulis nantikan. Terima kasih.

Jakarta, 2 Desember 2020

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman Persetujuan	ii
Executive Summary	iv
Kata Pengantar	vi
Daftar Isi	ix
Daftar Tabel	x
Daftar Gambar	xi
LAPORAN PROYEK PERUBAHAN	1
SEKILAS MENGENAI ORGANISASI INSPEKTORAT II	2
BAB I. LATAR BELAKANG	4
1.1. Deskripsi Kondisi Umum	4
1.2. Pemilihan Penetapan Area Perubahan	5
1.3. Keterkaitan Area Perubahan dengan Isu Strategis Kebijakan Organisasi	7
BAB II. TUJUAN DAN MANFAAT PROYEK PERUBAHAN	12
2.1. Tujuan Proyek Perubahan	12
2.2. Manfaat Perubahan	13
BAB III. OUTPUT KUNCI (<i>PROJECT KEY DELIVERABLES</i>)	15
BAB IV. PENTAHAPAN (<i>Milestones</i>) DAN CAPAIAN PELAKSANAAN KEGIATAN	16
4.1. Pelaksanaan Kegiatan Milestones Jangka Pendek	17
4.2. Pelaksanaan Kegiatan Milestones Jangka Menengah dan Panjang	35
BAB V. PENGELOLAAN SUMBERDAYA	36
5.1. Sumberdaya Kebijakan	36
5.2. Sumberdaya Manusia	36
5.3. Anggaran	37
5.4. Sarana Prasarana	37
BAB VI. STRATEGI KOMUNIKASI DAN MANAJEMEN STAKE- HOLDERS	38
6.1. Strategi Komunikasi	38
6.2. Manajemen Stakeholders	39
BAB VII. STRATEGI DIALOG DAN PEMASARAN ATAS PROYEK PERUBAHAN	43
BAB VIII. FAKTOR KUNCI KEBERHASILAN	45
BAB IX. KENDALA, RISIKO, DAN SOLUSI	47
BAB X. LESSON LEARNED KEPEMIMPINAN	51
BAB XI. MEMBANGUN ORGANISASI PEMBELAJAR	52
BAB XII. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	53
12.1. Kesimpulan	52
12.2. Rekomendasi	54
Lampiran	

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Kondisi Saat Ini dan Kondisi Yang Diharapkan	10
Tabel 2. Output Kunci Transformasi Monitoring dan Audit Digital	15
Tabel 3. Jadwal Kegiatan Jangka Pendek Proyek Perubahan	16
Tabel 4. Milestones Jangka Menengah dan Jangka Panjang	35
Tabel 5. Capaian Output Kunci	45
Tabel 6. Kendala, Risiko, dan Solusi	47
Tabel 7. Organisasi Pembelajar	52

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. SDM Inspektorat II Tahun 2020	3
Gambar 2. Empat Aspek Kebijakan Pembangunan Pertanian	4
Gambar 3. Coverage Pengawasan TA2019	4
Gambar 4. Gagasan Transformasi Monitoring dan Audit Digital	8
Gambar 5. Tujuan Transformasi Monitoring dan Audit Digital	13
Gambar 6. Pendekatan Pelaksanaan Transformasi Monitoring dan Audit Digital Itjen Kementan	18
Gambar 7. Rapat Pembentukan Tim Efektif	18
Gambar 8. Rapat Persiapan Penyusunan Proses Bisnis	20
Gambar 9. Rapat Penyusunan Proses Bisnis	21
Gambar 10. FGD Perumusan Identifikasi Risiko	22
Gambar 11. FGD Penyepakatan Risiko Pelaksanaan Program	24
Gambar 12. Bagan Alur Monitoring dan Audit Digital	25
Gambar 13. Penjelasan Konsep Aplikasi kepada Tim IT	25
Gambar 14. Pelatihan Petugas Input Data Digital	26
Gambar 15. Pemaparan Hasil Deliniasi Area	27
Gambar 16. Pemaparan Prototype	28
Gambar 17. Pelaksanaan Ground Check	28
Gambar 18. Pelaksanaan Sosialisasi Aplikasi	30
Gambar 19. Sosialisasi Melalui Media Online	30
Gambar 20. Pedoman Aplikasi AMOURAS	31
Gambar 21. Proses Penyusunan Kebijakan Pengawasan	31
Gambar 22. Pembahasan Draft Revisi Permentan Audit Charter	32
Gambar 23. Sosialisasi Pedoman Monitoring dan Audit Digital	33
Gambar 24. Ijin Akses Server Hosting	33
Gambar 25. Launching Aplikasi AMOURAS	34
Gambar 26. Pendaftaran Hak Cipta Aplikasi AMOURAS	35
Gambar 27. Organisasi Proyek Perubahan	36
Gambar 28. Analisis SOAR Transformasi Monitoring dan Audit Digital	39
Gambar 29. Peta Jejaring Kerja (networking map) Stakeholders	41

Gambar 30. Peta Perubahan Kedudukan Stakeholders	42
Gambar 31. Konsep 4 P 1 C dalam Proyek Perubahan	44
Gambar 32. Kegiatan Manajemen Organisasi Pembelajar Inspektorat II	52

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Rancangan Proyek Perubahan
- Lampiran 2. Bukti Pelaksanaan Implementasi Proyek Perubahan Jangka Pendek Milestone 1
- Lampiran 3. Bukti Pelaksanaan Implementasi Proyek Perubahan Jangka Pendek Milestone 2
- Lampiran 4. Bukti Pelaksanaan Implementasi Proyek Perubahan Jangka Pendek Milestone 3
- Lampiran 5. Bukti Pelaksanaan Implementasi Proyek Perubahan Jangka Pendek Milestone 4
- Lampiran 6. Bukti Pelaksanaan Implementasi Proyek Perubahan Jangka Pendek Milestone 5
- Lampiran 7. Bukti Pelaksanaan Implementasi Proyek Perubahan Jangka Pendek Milestone 6
- Lampiran 8. Bukti Pelaksanaan Implementasi Proyek Perubahan Jangka Pendek Milestone 7
- Lampiran 9. Bukti Pelaksanaan Implementasi Proyek Perubahan Jangka Pendek Milestone 8
- Lampiran 10. Bukti Pelaksanaan Implementasi Proyek Perubahan Jangka Pendek Milestone 9
- Lampiran 11. Bukti Pelaksanaan Implementasi Proyek Perubahan Jangka Pendek Milestone 10
- Lampiran 12. Bukti Pelaksanaan Implementasi Proyek Perubahan Jangka Pendek Milestone 11
- Lampiran 13. Bukti Pelaksanaan Implementasi Proyek Perubahan Jangka Pendek Milestone 12
- Lampiran 14. Bukti Pelaksanaan Implementasi Proyek Perubahan Jangka Pendek Milestone 13
- Lampiran 15. Bukti Pelaksanaan Implementasi Proyek Perubahan Jangka Pendek Milestone 14
- Lampiran 16. Bukti Pelaksanaan Implementasi Proyek Perubahan Jangka Pendek Milestone 15
- Lampiran 17. Bukti Pelaksanaan Implementasi Proyek Perubahan Jangka Pendek Milestone 16
- Lampiran 18. Bukti Pelaksanaan Implementasi Proyek Perubahan Jangka Pendek Milestone 17

LAPORAN PROYEK PERUBAHAN

**Transformasi Monitoring dan Audit Digital dalam
Mitigasi Risiko Pelaksanaan Program
Kementerian Pertanian**

SEKILAS MENGENAI ORGANISASI INSPEKTORAT II INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN



Inspektorat Jenderal sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) di Kementerian Pertanian memiliki peran yang sangat strategis dalam mendukung keberhasilan pembangunan pertanian yaitu dengan: (a) memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan

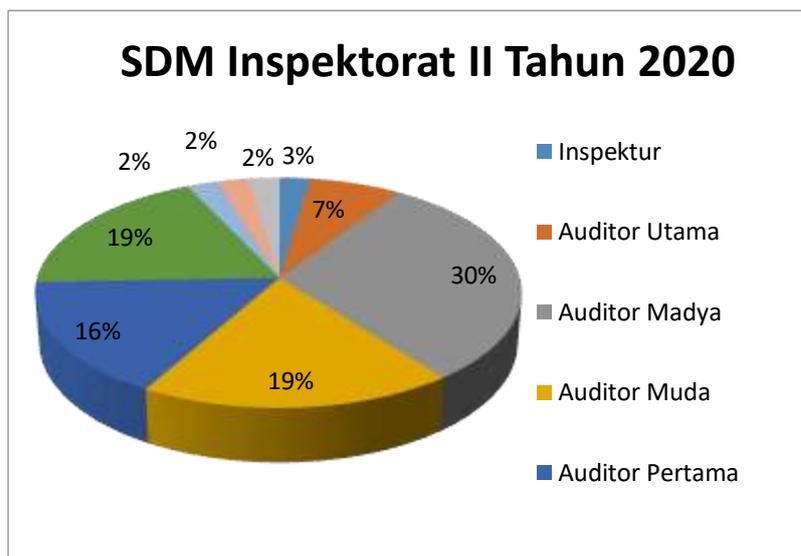
penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah; (b) memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah; dan (c) memberikan masukan yang dapat memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah.

Inspektorat II, sesuai Permentan No: 43/Permentan/OT.010/8/ 2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, pasal 816, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pengawalan, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya pada unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian dan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud tersebut, Inspektorat II menyelenggarakan fungsi: (a) Penyusunan rencana, program, kegiatan dan anggaran Inspektorat II; (b) Penyiapan perumusan kebijakan teknis pengawasan intern lingkup Inspektorat II; (c) Pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pengawalan, dan pemantauan, serta kegiatan pengawasan lainnya; (d) Penyusunan laporan hasil

pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan, serta pengawasan lainnya; dan (e) Pelaksanaan urusan tata usaha Inspektorat II.

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Inspektorat II diperkuat dengan sumber daya manusia sebanyak 43 orang, yaitu 1 orang Inspektur, 3 orang Auditor Utama, 13 orang Auditor Madya, 8 orang Auditor Muda, 7 orang Auditor Pertama, dan 8 orang calon auditor, serta 3 orang bagian Tata Usaha, dengan alokasi anggaran yang dikelola untuk TA 2020 senilai Rp7.320.695.000,00.



Gambar 1. SDM Inspektorat II Tahun 2020

BAB I

LATAR BELAKANG

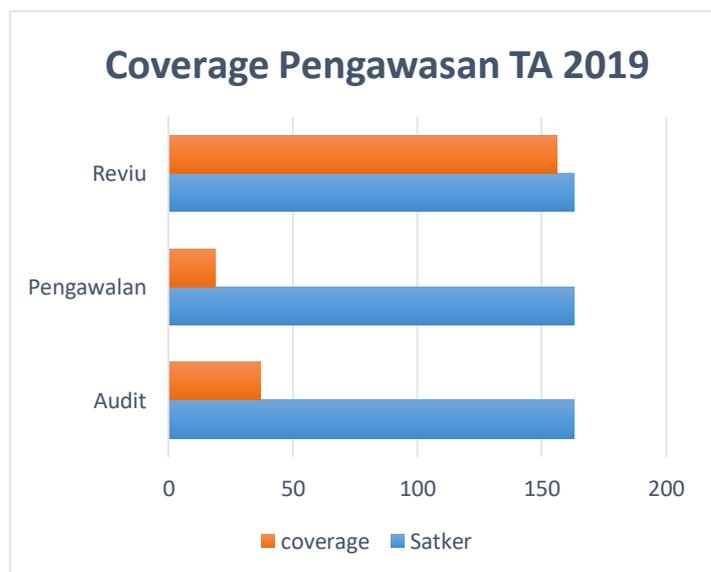
1.1. Deskripsi Kondisi Umum

Kementerian Pertanian mengeluarkan kebijakan dalam pembangunan pertanian 2020 untuk mewujudkan pertanian yang maju, mandiri dan modern. Untuk mencapai sasaran tersebut, ada 4 aspek yang perlu dijadikan fokus perhatian, sebagaimana gambar berikut.



Gambar 2. Empat Aspek Kebijakan Pembangunan Pertanian

Pada tahun 2019, Inspektorat II melaksanakan kegiatan audit berupa audit kinerja dan audit pengadaan barang/jasa seluruhnya sebanyak 35 satker (20,96%) dari total satker yang seharusnya dilakukan pengawasan sebanyak 167 satker, dengan jumlah rekomendasi yang dihasilkan sebanyak 142 rekomendasi (109,23 %) dari target sebanyak 130 rekomendasi. Karena keterbatasan coverage pelaksanaan pengawasan tersebut, maka pemilihan satker yang dilakukan audit didasarkan atas audit berbasis risiko (*Risk Based Audit*) dengan unit analisis satker.



Gambar 3. Coverage Pengawasan TA2019

Pada Tahun 2020, output dalam penugasan pengawasan lingkup Inspektorat II, minimal menghasilkan minimal 32 laporan hasil audit, 36 laporan hasil pengawalan/pembinaan SPIP, 10 laporan hasil reuiu, dan lebih dari 100 laporan hasil pengawasan lainnya (evaluasi, pemantauan, dll) yang seluruhnya dalam bentuk dokumen tercetak. Hal tersebut membawa kendala pada saat dilakukan konsolidasi apabila dibutuhkan untuk diolah sebagai dasar pengambilan kebijakan, selain itu dokumen tercetak merupakan media yang rawan untuk terjadi kehilangan termasuk berisiko rusak akibat insiden kebakaran.

Informasi dalam laporan hasil pengawasan merupakan data yang dibutuhkan bukan hanya pada satu waktu, melainkan informasinya saling terkait dan membentuk data *time series*. Dokumen manual memiliki kendala tersendiri dalam proses *tracing* data terkait karena memerlukan upaya pencarian secara konvensional untuk mengumpulkan seluruh informasinya. Hal tersebut rawan terhadap diskontinuitas data antar dokumen karena kontinuitas data sangat bergantung pada kecermatan dan kelengkapan pencarian dokumen manual.

Pelaksanaan audit yang berbasis waktu dan ruang menjadi sulit dibandingkan, dievaluasi, dan diuji mutu dokumen dan hasil audit oleh pihak independen. Karakteristik *non comparable*, *non accessable*, dan *non digital* tersebut memberi peluang terjadinya persekongkolan antara auditor dan auditi yang membawa implikasi hasil audit tidak menjadi alat mitigasi resiko dan penyimpangan melainkan menjadi tempat berserikatnya kejahatan utk mendistruksi sendi utama pembangunan. Para pihak akan memanfaatkan peluang untuk mengeruk kepentingan pribadi dan kelompoknya, sehingga negara dieksploitasi seperti milik dinasti sendiri.

1.2. Pemilihan Penetapan Area Perubahan

Dukungan Inspektorat Jenderal sesuai tugas dan fungsinya adalah melaksanakan tugas pengawasan terhadap pelaksanaan program. Dua unit eselon I dengan alokasi anggaran terbesar dalam kegiatan pengawasannya menjadi tanggung jawab unit kerja Inspektorat II. Berdasarkan tingginya anggaran di mitra kerja, kegiatan pengawasan

selama ini yang berbasis data manual, memiliki beberapa kelemahan dalam pelaksanaan pengawasan, sehingga digitalisasi data pengawasan menjadi solusi terbaik.

Digitalisasi dapat didefinisikan secara sederhana sebagai penyederhanaan materi informasi dalam bentuk kode biner (Marshall, 2004) atau penyatuan teknologi komunikasi dengan logika komputer (Schiller, 2000). Metode baru pengubahan data ini memiliki keunggulan dalam meningkatkan fleksibilitas penanganan, penyimpanan dan pengiriman data dari satu orang ke orang lainnya (Marshall, 2004). Selain itu, fleksibilitas yang ditawarkan oleh proses digitalisasi juga telah mempermudah proses transmisi dan manipulasi materi informasi yang berefek ekonomis bagi suatu jaringan, karena materi informasi dapat disebarluaskan secara lebih efisien di antara para pengguna jaringan tersebut (Schiller, 2000).

Menurut Sukmana (2005), digitalisasi adalah proses alih media dari bentuk tercetak, audio, maupun video menjadi bentuk digital. Digitalisasi dilakukan untuk membuat arsip dokumen bentuk digital, untuk fungsi fotokopi, dan untuk membuat koleksi perpustakaan digital. Digitalisasi memerlukan peralatan seperti komputer, scanner, operator media sumber dan *software* pendukung.

Digitalisasi memiliki beberapa manfaat antara lain: peningkatan aksestabilitas, peningkatan nilai tambah dan efisiensi biaya pemeliharaan (Pinusa, 2018). Manfaat tersebut diuraikan sebagai berikut:

Pertama, digitalisasi meningkatkan tingkat akses informasi. Pengguna informasi akan lebih mudah mengakses sumber informasi ilmiah berformat digital. Format digital akan kompatibel dengan beragam gawai (gadget), seperti: telepon pintar (smartphones), tablet dan laptop. Para pengguna informasi cukup membuka internet atau database elektronik guna mengakses sumber-sumber informasi ilmiah yang telah didigitalkan tanpa tersekat ruang dan waktu.

Kedua, informasi ilmiah berformat digital memberikan kesetaraan akses informasi bagi penyandang disabilitas digital. Ilustrasinya, informasi

ilmiah yang tersimpan dalam format tercetak dan telah dirubah dalam format digital/elektronik dapat ditambahkan beberapa fitur interaktif, berupa: audio, download text, dan huruf Braille.

Ketiga, digitalisasi memberikan kesempatan melakukan efisiensi biaya pemeliharaan koleksinya. Format digital tidak membutuhkan ruangan yang luas untuk penyimpanannya. Format tersebut cukup disimpan pada server dalam komputer sehingga format digital lebih menghemat ruang penyimpanan.

1.3. Keterkaitan Area Perubahan dengan Isu Strategis Kebijakan Organisasi

Proyek perubahan ini berjudul “Transformasi Monitoring dan Audit Digital dalam Mitigasi Risiko Pelaksanaan Program Kementerian Pertanian”. Digitalisasi Pengawasan dan Pemantauan merupakan salah satu upaya yang diharapkan mampu meningkatkan kualitas pengawasan agar lebih memberikan nilai tambah bagi pencapaian tujuan organisasi secara keseluruhan. Melalui Transformasi Monitoring dan Audit Digital dalam Mitigasi Risiko Pelaksanaan Program Kementerian Pertanian, tugas pengawasan terhadap pelaksanaan Program dapat dilaksanakan dengan memanfaatkan teknologi informasi modern, yang memungkinkan auditor menghasikan laporan audit secara berkala tanpa harus menunggu proses audit di akhir periode anggaran. Proses audit berjalan secara simultan bersamaan dengan eksekusi kegiatan yang dilakukan. Metode ini akan menghasilkan *early warning* yang memungkinkan manajemen segera mendapatkan informasi awal tentang masalah yang terjadi, penyebab hakiki, serta solusi yang dapat ditempuh.

Hal tersebut menjadi penting diterapkan, apalagi dimasa pandemi Covid-19 karena keterbatasan sumber daya sedangkan kebutuhan penyediaan informasi dalam rangka pengambilan keputusan harus dilakukan dengan cepat.

Sebagai aparat pengawas intern di lingkungan Kementerian Pertanian, Inspektorat II seharusnya dapat melakukan mitigasi secara dini terhadap hal-hal yang menyebabkan terjadinya risiko kegagalan dalam pelaksanaan program lingkup Ditjen Tanaman Pangan dan Ditjen

Prasarana dan Sarana Pertanian selaku mitra Inspektorat II. Salah satu upaya untuk melakukan mitigasi risiko tersebut dengan melakukan perubahan metode pengawasan melalui pengembangan digitalisasi pengawasan (audit) dan pemantauan (monitoring), sehingga pengawasan dapat dilakukan secara *realtime*.

Pengembangan *digitalisasi* audit dan monitoring merupakan bagian dari *continuous auditing, continuous monitoring (CACM)* yang menjadi tanggung jawab manajemen dan lembaga pengawasan intern dalam kerangka pengawasan dan pengendalian kegiatan. Melalui pengawasan Berkelanjutan dan Pemantauan Berkelanjutan (*Continous Auditing and Continous Monitoring – CACM*), Inspektorat Jenderal dapat melakukan pemantauan atas seluruh kegiatan pelaksana program/kegiatan, baik kegiatan utama maupun kegiatan penunjang dengan dukungan teknologi informasi. Dengan demikian, seluruh kegiatan yang menunjang pencapaian IKU Eselon I yang menjadi mitra Itjen, dapat dipantau secara berkelanjutan.



Gambar 4. Gagasan Transformasi Monitoring dan Audit Digital

Dengan mengimplementasikan monitoring dan audit digital, Inspektorat Jenderal dapat melakukan pemantauan atas seluruh kegiatan

baik kegiatan utama maupun penunjang mitra Eselon I secara real time yang berbasis teknologi informasi, sehingga kondisi ideal yang ingin dicapai di bawah ini dapat diwujudkan, yaitu:

- a. Terbangunnya *early warning system* terkait pengelolaan keuangan dan kinerja sehingga lebih fokus pada pengendalian preventif dan detektif. Implementasi monitoring dan audit digital dapat lebih mempermudah dalam mengidentifikasi permasalahan yang terjadi di suatu organisasi. Dengan adanya monitoring dan audit digital, setiap adanya perubahan kualitas kinerja dapat segera diketahui dan jika kondisinya memburuk akan memberikan *early warning system*.
- b. Tersedianya informasi audit untuk digunakan dalam pengambilan keputusan secara real time. Melalui monitoring dan audit digital, audit dapat menilai kualitas kinerja dari waktu ke waktu dan memastikan resolusi yang tepat dari masalah yang teridentifikasi. Didukung dengan adanya penggunaan teknologi informasi, permasalahan yang terjadi dapat diketahui secara real time dan keputusan untuk mengatasinya dapat segera dilakukan. Prediktor kinerja berdasarkan data yang ada harus responsif terhadap perubahan kinerja, sehingga dapat memberikan peringatan dini ketika kinerja memburuk. Mereka dapat membantu organisasi menjawab tiga pertanyaan mendasar jika indikatornya merah: 1) apa yang terjadi? 2) apa dampaknya? dan 3) apa yang perlu kita lakukan untuk mengatasinya?
- c. Peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan kinerja Eselon I. Implementasi monitoring berkelanjutan pada aktivitas Eselon I dan audit kontinu pada kegiatan yang paling berisiko dapat memberikan keyakinan bahwa setiap kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan. Jika ditemukan adanya kesalahan dan penyelewengan, auditor dapat segera memberikan rekomendasi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Langkah tersebut dapat memperbaiki akuntabilitas dan kinerja Eselon I.
- d. Peningkatan efisiensi dan efektivitas sumber daya kegiatan pengawasan di Inspektorat. Penggunaan teknologi informasi dalam monitoring dan audit digital dapat memberikan informasi yang diperlukan secara

otomatis dan pembagian beban kerja tepat sehingga lebih efisien. Selain itu, implementasi monitoring dan audit digital yang baik dapat mempermudah dalam menemukan titik permasalahan yang terjadi secara lebih cepat dan lebih pasti.

- e. Menjadi rujukan *benchmarking* dan *benchlearning* APIP kelas dunia bagi APIP dan AAPI. Jika implementasi monitoring dan audit digital di Inspektorat Jenderal dan Eselon I secara umum berjalan dengan baik, bukan hal yang mustahil monitoring dan audit digital tersebut dapat menjadi *benchmarking* dan *benchlearning* (rujukan pembelajaran) bagi APIP lain yang tergabung dalam AAPI. Sejauh ini, belum banyak APIP yang menerapkan CACM pada pelaksanaan tugasnya.
- f. Tools untuk pencegahan korupsi (*fraud prevention*). Penerapan monitoring dan audit digital yang baik dapat memberikan peringatan dini untuk mencegah terjadinya korupsi. Melalui informasi yang didapatkan secara terus-menerus, manajemen yang menerapkan monitoring dan audit digital secara simultan dapat dengan mudah mendeteksi kejadian-kejadian yang tidak biasa, sehingga memudahkan bagi manajemen untuk mencari solusi pemecahan dari kejadian yang tidak biasa tersebut.

Secara umum, perkembangan dari kondisi saat ini dan kondisi yang diharapkan dengan implementasi monitoring dan audit digital sebagai berikut:

Tabel 1. Kondisi Saat Ini dan Kondisi Yang Diharapkan

No	Uraian	Kondisi Saat Ini	Kondisi yang Diharapkan
1	Waktu pelaksanaan	Post Audit	Pra, during, post audit
2	Kebutuhan waktu dan personil	Pelaksanaan audit relatif lama dan jumlah personil yang dibutuhkan lebih banyak	Waktu pelaksanaan lebih cepat, jumlah personil lebih sedikit
3	Basis data	Data susah ditelusuri, antar data susah untuk dibandingkan, pengukuran data lebih membutuhkan waktu, serta penerimaan informasi terhadap data sama kepada semua user	Traceable, comparable, measurable, fairness

No	Uraian	Kondisi Saat Ini	Kondisi yang Diharapkan
4	Volume data	Data terbatas pada periode tertentu dan pengumpulan data dalam periode lebih lama	Data continue, bisa sensus, periode pengumpulan data bisa lebih cepat (tidak lagi tahunan, bulanan)
5	Kontrol data	Data manual lebih sulit untuk dikontrol	Achievable Controlable
6	Pola audit/monitoring	Audit konvensional	Unik dan spesial
7	Kebutuhan biaya	Memerlukan sumber biaya cukup tinggi	Cost effective
8	Bentuk data	Manual	Temporer, spasial, digital
9	Skill	Standard national skill	Improvement national skill
10	Risiko kesalahan	Risiko terjadi kesalahan mendeteksi data cukup tinggi	Minimum risk
12	Pencapaian tujuan audit	Pelaksanaan audit hanya pada topik dan data tertentu serta pengaksesan data terbatas karena berupa dokumen manual	Muple purposes dan multiple user, richness
13	Investment	Minimal intellectual investment	Maximal intellectual investment

BAB II

TUJUAN DAN MANFAAT PROYEK PERUBAHAN

2.1 Tujuan Proyek Perubahan

Tujuan utama proyek perubahan adalah melakukan perubahan metode pengawasan melalui pembangunan *system monitoring and audit digital* dalam rangka melakukan mitigasi risiko sehingga jika terjadi penyimpangan dapat diketahui lebih dini, dapat memberikan *early warning*, dan tujuan tercapai dengan akuntabilitas yang dapat dipertanggung-jawabkan.

Berdasarkan waktu pengerjaan proyek perubahan memiliki 3 (tiga) tujuan, yaitu:

1. Jangka Pendek

Kegiatan yang direncanakan dalam tujuan jangka pendek adalah kegiatan yang secara realistis dan logis dapat dikerjakan dan dicapai untuk mewujudkan tahapan-tahapan perubahan yang akan dicapai dalam waktu dua bulan pada saat *off campus*.

Secara garis besar, kegiatan yang direncanakan dalam tujuan jangka pendek diharapkan dapat menciptakan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Penyusunan Proses Bisnis Program lingkup Kementan, khususnya kegiatan *Food Estate* lingkup Ditjen PSP dan kegiatan PATB lingkup Ditjen Tanaman Pangan.
- b. Penyusunan Risiko per Proses Bisnis Program.
- c. Penyepakatan Proses Bisnis dan Risiko per Proses Bisnis.
- d. Penyusunan *Tentative Audit Objective* (TAO) Pelaksanaan Program *Food Estate* dan PATB.
- e. Pembuatan aplikasi monitoring dan audit digital AMOURAS.
- f. Penyusunan Pedoman Audit Monitoring dan Audit Digital.
- g. Uji coba aplikasi dengan Mitra Eselon I di tingkat Pusat.
- h. Penyusunan Kebijakan Pengawasan (*Draft*).
- i. Penyusunan Revisi *Audit Charter* (*Draft*).

2. Jangka Menengah

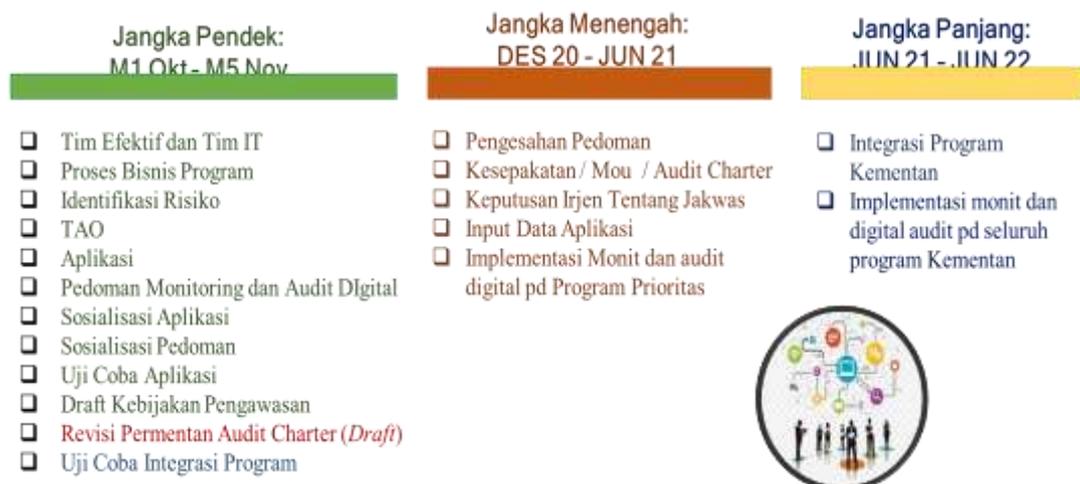
Tujuan jangka menengah akan dicapai dalam jangka waktu 6 bulan. Tujuan jangka menengah tersebut antara lain:

- a. Penyepakatan pelaksanaan Monitoring dan Audit Digital.
- b. Pengesahan Keputusan Irjen tentang Kebijakan Pengawasan Tahun 2021.
- c. Proses input progress kegiatan oleh mitra kerja.
- d. Implementasi Monitoring dan Audit Digital pada Program Prioritas lingkup Kementan.

3. Jangka Panjang

Tujuan jangka Panjang akan dicapai dalam jangka waktu 1 - 2 tahun. Tujuan jangka panjang tersebut antara lain:

- a. Integrasi/Pengembangan koneksitas data seluruh program Kementan.
- b. Implementasi Monitoring dan Audit Digital pada seluruh program Kementerian Pertanian.
- c. Pelaksanaan pembangunan pertanian dan penggunaan anggaran program Kementerian Pertanian dapat dimonitor secara baik dan benar.



Gambar 5. Tujuan Transformasi Monitoring dan Audit Digital

2.2 Manfaat Perubahan

Pengembangan Monitoring and Audit Digital dalam Mitigasi Risiko Pelaksanaan Program Kementerian Pertanian merupakan bagian penting untuk diterapkan, apalagi dimasa pandemi Covid-19 karena keterbatasan sumber daya sedangkan kebutuhan penyediaan informasi pengambilan

keputusan harus dilakukan dengan cepat. Pengambilan keputusan yang baik adalah yang berlandaskan pada pemilihan atas sejumlah alternatif setelah melalui analisis dan pertimbangan yang matang.

Manfaat monitoring *and audit digital* sangat penting karena memberikan manfaat bagi para pemangku kepentingan, antara lain: a) Memperluas kemampuan pengambil keputusan dalam memproses data/informasi bagi pemakainya dan membantu pengambil keputusan dalam penghematan waktu yang dibutuhkan untuk memecahkan masalah, b) Membantu para pengambil keputusan dalam mengambil prioritas masalah yang harus didahulukan solusinya secara cepat dan cermat, c) Membantu menyelesaikan masalah yang memiliki banyak alternatif, karena data-data diinput dan diolah menggunakan teknologi komputer, dan penggunaan database sehingga dapat membantu menyelesaikan masalah yang kualitatif secara kuantitatif dengan menimbang semua kriteria yang dibutuhkan dalam mengambil keputusan.

Selain itu manfaat yang *diperoleh* adalah mempermudah pimpinan dalam melakukan monitoring dan mendeteksi secara dini permasalahan yang akan menghambat tercapainya tujuan program sehingga dapat melakukan pengambilan keputusan yang tepat dan cepat dalam upaya mitigasi, yaitu:

1. Kepada Lembaga: System yang dibangun akan mempermudah Inspektorat Jenderal dalam melakukan mitigasi terhadap risiko kegagalan Program.
2. Kepada Jabatan: System yang dibangun akan mempermudah auditor Inspektorat II untuk melaksanakan pemantauan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan program.

Mempermudah pimpinan dalam memantau dan mereviu perkembangan pelaksanaan penugasan oleh Tim Auditor sehingga terhadap permasalahan yang membutuhkan kebijakan/keputusan/kewenangan pimpinan dapat cepat dieksekusi.

3. Kepada Stakeholder: Berkurangnya penyimpangan, risiko kegagalan program cepat teridentifikasi dan dikendalikan.

BAB III

OUTPUT KUNCI (*PROJECT KEY DELIVERABLES*)

Sesuai dengan tugas dan fungsi dari Inspektorat II Itjen Kementan, maka *output* kunci dalam proyek perubahan ini, yaitu:

Tabel 2. Output Kunci Transformasi Monitoring dan Audit Digital

Output	Deskripsi
1. Kesepakatan Daftar Risiko dan Mitigasinya Program lingkup Ditjen TP dan Ditjen PSP	Daftar Risiko dan Mitigasi Risiko yang disepakati dengan Eselon I Penanggungjawab Program merupakan risiko yang akan dilakukan monitoring dan audit secara digital dan berkelanjutan.
2. Aplikasi monitoring dan audit digital AMOURAS.	Merupakan aplikasi pelaksanaan monitoring dan audit digital lingkup Kementerian Pertanian
3. Pedoman Monitoring dan Audit Digital.	Merupakan pedoman teknis bagi seluruh <i>stakeholders</i> internal Inspektorat Jenderal dalam melakukan monitoring dan audit digital.
4. Kebijakan Pengawasan (<i>Draft</i>).	Merupakan payung hukum dalam melaksanakan monitoring dan audit digital lingkup internal Itjen Kementerian Pertanian
5. Revisi Permentan no. 464/Kpts/KP.590/7/2016 tentang Audit Charter (<i>draft</i>)	Merupakan payung hukum dalam melaksanakan monitoring dan audit digital lingkup Eselon I Kementerian Pertanian

BAB IV

PENETAHAPAN (*Milestones*) DAN CAPAIAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan rancangan proyek perubahan diawali dengan melakukan rapat persiapan dengan seluruh staf auditor Inspektorat II dan kepala Subbagian Tata Usaha Inspektorat II untuk mereviu, menetapkan tahapan (*milestones*) proyek perubahan, dan sekaligus menyepakati jadwal kegiatan yang merupakan rencana pengaturan urutan kerja dalam mencapai output proyek perubahan. Tabel jadwal kegiatan jangka pendek proyek perubahan dapat dilihat pada Tabel 3 berikut.

Tabel 3. Jadwal Kegiatan Jangka Pendek Proyek Perubahan

No.	Tahapan Kegiatan	Waktu										Output/ Capaian	Stakeholders	Evidence	
		September				Nopember									
		M1	M2	M3	M4	M1	M2	M3	M4	M5					
1	Pembentukan Tim Efektif Monitoring dan Audit Digital														
a.	Rapat Pembentukan Tim												Saran dan masukan dalam pelaksanaan proper oleh Tim	Project Leader; Auditor Itjen	Surat Undangan, notulen, foto kegiatan
b.	Penyusunan Draft SK Tim Efektif												Draft SK	Project Leader; Auditor Itjen	Draft SK
c.	Pengesahan Draft SK												Legalisasi SK	Project Leader; Auditor Itjen	Surat Keputusan Penetapan Tim Efektif yang sudah disahkan
2	Pembentukan Tim Aplikasi Monitoring dan Audit Digital														
a.	Rapat Pembentukan Tim												Saran dan masukan dalam pelaksanaan proper oleh Tim	Project Leader, Tim IT	Surat Undangan, notulen, foto kegiatan
b.	Penyusunan Draft SK Tim Efektif												Draft SK	Project Leader, Tim IT	Draft SK
c.	Pengesahan Draft SK												Legalisasi SK	Project Leader, Tim IT	Surat Keputusan Penetapan Tim Aplikasi yang sudah disahkan
3	Penyusunan Proses Bisnis Program Lingkup Kementerian Pertanian														
a.	Rapat koordinasi persiapan penyusunan Proses Bisnis												Saran dan masukan terkait bisnis proses program dari	Project Leader, Ditjen TP, Ditjen PSP	Surat Undangan, notulen, foto kegiatan
b.	Konsinyering Penyusunan Proses Bisnis oleh Tim Efektif												Draft Proses Bisnis	Project Leader, Ditjen TP, Ditjen PSP	Daftar Proses Bisnis Program FE dan PATB
4	Penyusunan Risiko Program Per Proses Bisnis														
a.	Pengumpulan data dalam rangka Identifikasi risiko dan mitigasinya												Laporan	Auditor Ir2	Laporan Kegiatan Pengawasan
b.	Konsinyering Perumusan Identifikasi Risiko per Proses Bisnis												Draft Identifikasi Risiko per Proses Bisnis	Project Leader, Ditjen TP, Ditjen PSP	Daftar Risiko dan Mitigasinya
5	Penyepakatan Proses Bisnis dan Identifikasi Risiko														
a.	Rapat Pembahasan Hasil Identifikasi Risiko per Proses Bisnis dan Mitigasinya												Saran dan masukan terkait hasil identifikasi risiko dan mitigasinya dari stakeholder	Project Leader, Ditjen TP, Ditjen PSP	Surat Undangan, notulen, foto kegiatan
b.	FGD Penyepakatan Risiko Pelaksanaan Program												BA Kesepakatan	Project Leader, Ditjen TP, Ditjen PSP	BA Kesepakatan
6	Penyusunan Tentative Audit Objective (TAO)														
	Penyusunan TAO												Draft TAO	Tim Efektif	Daftar TAO

No.	Tahapan Kegiatan	Waktu										Output / Capaian	Stakeholders	Evidence	
		September				Nopember									
		M1	M2	M3	M4	M1	M2	M3	M4	M5					
7	Pembangunan Aplikasi Monitoring dan Audit Digital														
a.	Penjelasan konsep Aplikasi kepada Tim IT												Saran masukan dari Mentor kepada tim IT	Project Leader, Mentor, Tim IT	Undangan, Notulen, foto
b.	FGD Inventarisasi Data Digital dengan LAPAN												Saran masukan dari LAPAN kepada tim IT	Tim IT	Undangan, Notulen, foto
c.	Pelatihan Petugas Input Data Digital di LAPAN												Terlatihnya tim IT	Tim IT	Surat Tugas, Laporan Kegiatan, Foto
d.	Koordinasi dengan Bakosurtranal												Saran masukan dari Bakosurtranal kepada tim IT	Project Leader, Mentor, Tim IT	Surat, Data Tergeoreferensi dari Bakosurtranal
e.	Deliniasi Area Provitas IP dan Luas Tanam berdasarkan Respon Spektra dari Object Citra												Peta Deliniasi Digital	Project Leader, Tim IT	Surat Tugas, Laporan Kegiatan, Peta Deliniasi Digital, Foto dokumentasi
f.	Pemaparan Prototype Monitoring dan Audit Digital												Rancang Bangun Aplikasi	Project Leader, Mentor, Tim IT	Undangan, Rancang Bangun Aplikasi, Foto
g.	Ground cek Peta Citra												Saran masukan kepada tim IT	Project Leader, Tim IT	Surat Tugas, Laporan Kegiatan, Foto dokumentasi
8	Penyusunan Draft Pedoman Monitoring dan Audit Digital														
a.	Rapat koordinasi persiapan penyusunan Draft Pedoman												Saran masukan kepada Tim Efektif Draft Pedoman	Project Leader, Tim Efektif	Undangan, Notulen, Foto dokumentasi
b.	Konsinyering Penyusunan Pedoman												Draft Pedoman	Project Leader, Tim Efektif	Surat Tugas, Laporan, Draft Pedoman, Foto
c.	Pembahasan Draft Pedoman												Draft Pedoman	Project Leader, Tim Efektif	Surat Tugas, Notulen, Draft Pedoman, Foto
9	Sosialisasi Aplikasi														
a.	Lomba Logo Amouras												Pemenang Logo	Project Leader, Tim Efektif	Nota Dinas, Pengumuman Lomba, Hasil Penilaian oleh Tim, Daftar Pemenang, Foto
b.	FGD Sosialisasi Aplikasi dengan stakeholder internal												Saran masukan dari peserta sosialisasi	Project Leader, Tim Efektif	Undangan, Notulen, Foto dokumentasi
c.	FGD Sosialisasi Aplikasi dengan stakeholder eksternal												Saran masukan dari peserta sosialisasi	Project Leader, Tim Efektif	Undangan, Notulen, Foto dokumentasi
10	Sosialisasi Draft Pedoman														
	FGD Sosialisasi Pedoman												Saran masukan dari peserta sosialisasi	Project Leader, Tim Efektif	Undangan, Notulen, Foto dokumentasi
11	Uji Coba Aplikasi														
	Melakukan Uji Coba Aplikasi												Saran masukan kepada Tim IT	Project Leader, Tim IT	Surat Tugas, Laporan, foto dokumentasi
12	Penyempurnaan System														
	Perbaiki aplikasi sesuai hasil uji coba												Aplikasi Amouras	Project Leader, Tim IT	Aplikasi Amouras
13	Pendaftaran Aplikasi ke Pusdatin														
	Pendaftaran Aplikasi ke Pusdatin												Aplikasi Amouras	Project Leader, Tim IT	Surat ke Pusdatin, Link Aplikasi Amouras di
14	Penyusunan Draft Kebijakan Pengawasan														
a.	Rapat Koordinasi Persiapan Penyusunan Draft Kebijakan Pengawasan												Saran masukan kepada Tim Efektif	Project Leader, Tim Efektif	Undangan, Notulen, Foto dokumentasi
b.	Penyusunan Kebijakan Pengawasan												Draft Kebijakan Pengawasan	Project Leader, Tim Efektif	Surat Tugas, Laporan, Draft Jakwas, Foto
c.	FGD Pembahasan Kebijakan Pengawasan												Draft Kebijakan Pengawasan	Project Leader, Tim Efektif	Surat Tugas, Notulen, Draft Jakwas, Foto
15	Lounging Aplikasi													Project Leader, Tim IT, Auditor Itjen, Ditjen TP, Ditjen PSP	Undangan, foto dokumentasi

4.1. Pelaksanaan Kegiatan dan Capaian Milestone Jangka Pendek

Dalam rangka mencapai tujuan proyek perubahan, maka diperlukan suatu alur pelaksanaan perubahan yang jelas. Komitmen *stakeholders* yang terlibat langsung dengan pelaksanaan proyek perubahan merupakan landasan kunci dari tercapainya Transformasi

Monitoring dan Audit Digital dalam Mitigasi Risiko Pelaksanaan Program lingkup Kementan. Adapun alur/pendekatan pelaksanaan proyek perubahan ini dapat disajikan pada gambar berikut.



Gambar 6. Pendekatan Pelaksanaan Transformasi Monitoring dan Audit Digital Itjen Kementan

4.1.1. Pembentukan Tim Efektif

Tim Efektif adalah sekelompok orang dalam jumlah kecil dengan keterampilan yang saling melengkapi, berkomitmen terhadap tujuan bersama dan menggunakan pendekatan terhadap tanggungjawab bersama. Tim ini dibentuk untuk melaksanakan proyek perubahan, terutama dalam hal pemecahan setiap masalah yang bersifat jangka pendek.



Gambar 7. Proses Pembentukan Tim Efektif

Pembentukan Tim Efektif merupakan salah satu rencana kegiatan yang telah tertuang dalam milestone proyek perubahan. Tahap pembentukan Tim efektif meliputi rapat persiapan internal lingkup Inspektorat Jenderal Kementan, pembuatan Surat Keputusan Tim Efektif, dan penyusunan Jadwal Kegiatan.

a. Rapat persiapan Pembentukan Tim Efektif

Dalam rapat persiapan Tim Efektif, *Project Leader* menyampaikan gagasan rencana proyek perubahan kepada seluruh auditor dan staf Tata Usaha Inspektorat 2. Selanjutnya menjelaskan bahwa proyek perubahan merupakan bagian dari kegiatan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II, sebagai bentuk implementasi dari organisasi pembelajar yang menghasilkan output yang bermanfaat baik bagi Inspektorat 2, maupun Inspektorat Jenderal dan Kementerian Pertanian secara umum.

Rapat bertujuan untuk menggali dan menyamakan persepsi terkait kondisi kekuatan dan kelemahan serta tantangan tugas Inspektorat 2 kedepan yang semakin berat dan kompleks. Beberapa permasalahan yang diangkat adalah pelaksanaan kegiatan pengawasan lingkup Inspektorat 2 dari segi waktu pelaksanaan, *coverage* pengawasan, dan efektifitas pengawasan. Dengan adanya kesamaan persepsi tersebut, seluruh auditor dan staf TU berkomitmen untuk meningkatkan kinerja dan peran Inspektorat 2. Untuk itu telah disepakati pentingnya melakukan transformasi monitoring dan audit dari cara konvensional menjadi digital monitoring.

b. Penetapan Tim Efektif

Penetapan Tim Efektif didasarkan pada kebutuhan yang disesuaikan dengan kompetensi dan tugas masing-masing personil. Tim Efektif ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan (SK) Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian No. B.2041/Kpts/OT.050/G/10/2020 tanggal 1 Oktober 2020 tentang Pembentukan Tim Efektif dan Tim Aplikasi Monitoring dan Audit Digital Dalam Mitigasi Risiko

Pelaksanaan Program Kementerian Pertanian (Surat Keputusan terlampir).

4.1.2. Pembentukan Tim Aplikasi

Pembangunan aplikasi untuk mendukung transformasi monitoring dan audit digital seluruhnya dilakukan oleh staf Sekretariat Inspektorat Jenderal. Personil yang terlibat dalam penyusunan aplikasi ditetapkan dengan Surat Keputusan (SK) Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian No. B.2041/Kpts/OT.050/G/10/2020 tanggal 1 Oktober 2020 tentang Pembentukan Tim Efektif dan Tim Aplikasi Monitoring dan Audit Digital Dalam Mitigasi Risiko Pelaksanaan Program Kementerian Pertanian (Surat Keputusan terlampir).

4.1.3. Penyusunan Proses Bisnis Program Lingkup Kementan

Proses bisnis adalah serangkaian aktivitas kerja terstruktur yang menggambarkan keterkaitan antara satu kegiatan atau unit kerja dengan kegiatan atau unit kerja lainnya, yang akan menghasilkan keluaran aktivitas sesuai dengan tujuan yang ditetapkan.

a. Rapat Koordinasi Persiapan Penyusunan Proses Bisnis

Rapat koordinasi dihadiri oleh Inspektur Jenderal selaku Mentor, Sesditjen Prasarana dan Sarana Pertanian, Direktur Serealia, dan Tim Efektif yang bertugas menyusun Proses Bisnis Program lingkup Inspektorat 2.



Gambar 8. Rapat Persiapan Penyusunan Proses Bisnis

Dari hasil rapat persiapan penyusunan proses bisnis tersebut diperoleh saran masukan dari stakeholder internal dan eksternal yaitu Dtjen tanaman Pangan (Ditjen TP) dan Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian (Ditjen PSP) selaku mitra Inspektorat 2. Saran dan masukan dari hasil rapat tersebut menjadi pertimbangan Tim untuk menyusun proses bisnis yang diperlukan dalam rangka membangun aplikasi guna mendukung terlaksananya Transformasi Monitoring dan Audit Digital.

b. Penyusunan Proses Bisnis

Penyusunan proses bisnis dilaksanakan oleh Tim Efektif dalam rangka memastikan telah teridentifikasinya proses bisnis kegiatan sehingga dapat disepakati alur monitoring dan audit yang akan dilaksanakan. Proses bisnis kegiatan pokok dapat diidentifikasi secara lebih mudah melalui pengenalan atau identifikasi tentang suboutput yang harus ada untuk menghasilkan output kegiatan pokok. Kegiatan untuk menghasilkan sub output ini merupakan tahapan yang membentuk proses bisnis kegiatan.



Gambar 9. Penyusunan Proses Bisnis

4.1.4. Penyusunan Risiko Program

Dalam pengembangan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang mendasari transformasi pelaksanaan monitoring dan audit digital, kegiatan identifikasi risiko merupakan hal yang sangat penting untuk mengantisipasi kegagalan program. Melalui identifikasi risiko dapat dipetakan sub kegiatan mana yang memiliki risiko tinggi sehingga perlu

dilakukan monitoring berkelanjutan. Dalam penyusunan risiko program ada 2 sub kegiatan yang dilakukan, yaitu 1) Pengumpulan data dalam rangka identifikasi risiko dan mitigasinya melalui kegiatan Pengawasan di Lokasi Program *Food Estate* dan Program Perluasan Areal Tanam Baru, serta 2) Konsinyering perumusan identifikasi risiko per proses bisnis yang dilakukan oleh Tim Efektif.

- a. Pengumpulan data dalam rangka identifikasi risiko dan mitigasinya melalui kegiatan Pengawasan.

Pengumpulan data dilakukan secara uji petik di 4 provinsi pelaksana kegiatan, yaitu Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Lampung, dan Kalimantan Tengah. Laporan lengkap hasil identifikasi risiko dan mitigasinya yang dilakukan melalui kegiatan di 4 provinsi terlampir.

- b. Perumusan identifikasi risiko per proses bisnis

Dari hasil pengumpulan data di 4 provinsi tersebut, Tim Efektif bersama *stakeholders internal* selanjutnya melakukan konsinyering guna merumuskan identifikasi risiko Program *Food Estate* dan PATB.



Gambar 10. FGD Perumusan Identifikasi Risiko

Beberapa hasil identifikasi risiko untuk kegiatan *Food Estate*, antara lain: 1) Pedoman Teknis belum dibuat, 2) Lokasi cluster utama pilot project seluas 1.000 ha belum ditetapkan, 3) Alokasi CP/CL yang teridentifikasi dan terverifikasi baru seluas 28.315 ha dari target 30.000 ha, 4) Penerima bantuan berpotensi terjadi tumpang tindih/overlap dan tidak merata (terdapat petani yang tidak mendapat bantuan), 5) Pengadaan saprodi tidak tepat sasaran, tidak sesuai spesifikasi teknis, volume tidak sesuai kontrak, penyaluran tidak tepat waktu sesuai dengan jadwal tanam, 6) Kegiatan pendukung pengolahan tanah, berupa operator alsintan, bahan bakar subsidi, bengkel alsintan belum dilakukan mobilisasi, dan 7) Bukti pertanggungjawaban pengadaan saprodi tidak lengkap, tidak diinput dan diupload dalam aplikasi BAST Banpem.

Beberapa risiko yang dapat diidentifikasi untuk kegiatan PATB, yaitu: 1) Usulan CP/CL yang ditetapkan tidak sesuai dengan kriteria dalam pedoman dan kriteria PATS belum clear, 2) Sarana yang digunakan untuk mengukur luas lahan CP/CL menggunakan aplikasi ArcGis kurang memadai, dan 3) Saprodi (Benih, pupuk, dan herbisida) yang siap disalurkan pada bulan September tidak mencukupi kebutuhan tanam dalam mendukung kegiatan PATB.

4.1.5. Penyepakatan Proses Bisnis, Risiko, dan Mitigasi Risiko

Sesuai hasil pengumpulan data dan identifikasi risiko yang dilakukan Tim, proses bisnis, risiko, dan kegiatan pengendalian dalam rangka mitigasi risiko dibahas dalam rapat pembahasan dengan *stakeholders eksternal* untuk mendapatkan saran masukan khususnya dalam mitigasi risiko, disesuaikan dengan kondisi lapangan. Hasil pembahasan dituangkan dalam notulen, sebagai bahan pertimbangan perbaikan Daftar Risiko dan Mitigasinya untuk Program *Food Estate* dan Program PATB.

Daftar Risiko yang telah disusun dikomunikasikan dengan Eselon I Penanggungjawab Program, yaitu Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) untuk kegiatan *Food Estate* dan Ditjen Tanaman Pangan untuk kegiatan Perluasan Areal Tanam Baru. Penyepakatan Proses

Bisnis, Risiko dan Mitigasinya dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan yang ditandatangani oleh Inspektur Jenderal, Dirjen Tanaman Pangan, dan Dirjen PSP. Dokumen Berita Acara Kesepakatan (terlampir).



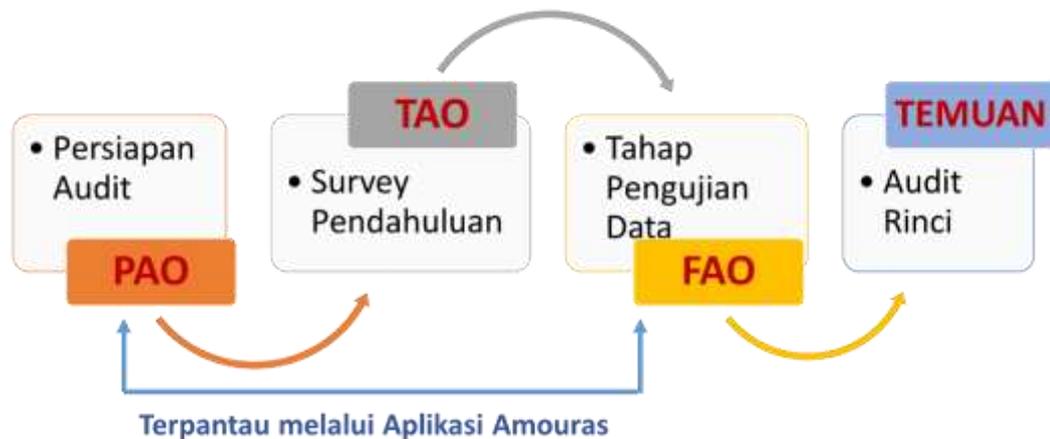
Gambar 11. FGD Penyepakatan Risiko Pelaksanaan Program

4.1.6. Penyusunan Tentative Audit Objective (TAO).

Dalam pelaksanaan audit, penerapan tujuan audit diawali dengan menetapkan *Tentative Audit Objective* (TAO) berdasarkan informasi umum yang diperoleh pada saat pemahaman entitas. Apabila auditor telah mengidentifikasi aspek manajemen atau bidang pada auditee yang mempunyai kelemahan dan perlu dilakukan pengujian lebih lanjut, maka TAO disempurnakan menjadi FAO (*Firm Audit Objective*). Dengan adanya TAO maka pengumpulan bukti dapat dilaksanakan dengan lebih murah, mudah, dan terarah.

Dalam pelaksanaan transformasi monitoring dan audit digital, penetapan TAO akan menentukan aspek-aspek apasaja yang akan dimunculkan dalam aplikasi yang akan dibangun, sehingga data dan informasi yang dituangkan dan disajikan oleh aplikasi dapat mendukung menjadi bukti awal dan dianalisis menjadi FAO. Selanjutnya dari FAO tersebut dilakukan audit rinci ke lapangan sebagai

pembuktian sebelum menjadi temuan. Bagan alur tahapan pelaksanaan monitoring dan audit digital dapat dilihat pada Gambar 12 berikut.



Gambar 12. Bagan Alur Monitoring dan Audit Digital

4.1.7. Pembuatan Aplikasi Monitoring dan Audit Digital

Salah satu *output* dari proyek perubahan ini adalah terciptanya aplikasi monitoring dan audit digital yang diberi nama Amouras, yaitu *Audit and Monitoring Using Remote Sensing Tool Trough Automatic System*. Dalam menciptakan aplikasi ini Inspektorat 2 dibantu oleh tim IT yang merupakan staf pada Sekretariat Inspektorat Jendral. Adapun tahapan yang dilakukan untuk membuat aplikasi Monitoring dan Audit Digital sebagai berikut:

a. Penjelasan konsep aplikasi kepada tim IT

Tim IT bertugas membuat rancangan system Monitoring dan Audit Digital dengan data berbasis tabular dan spasial. Rancangan, ide, dan gagasan dibahas pada rapat penjelasan konsep aplikasi kepada tim IT.



Gambar 13. Penjelasan Konsep Aplikasi kepada Tim IT

b. Inventarisasi data digital dengan LAPAN

Dalam rangka penyusunan aplikasi Monitoring dan Audit Digital diperlukan data spasial yang diperoleh dari citra landsat 8. Untuk memperoleh data tersebut dilakukan koordinasi dengan LAPAN. Inventarisasi data dilakukan untuk membuat indikasi data spasial terhadap suhu dan warna, data spasial kondisi lengas tanah (soil moisture) composit true colour, indikasi sedang olah tanam melalui land cover dengan interes olah tanah, vegetative 1, vegetative 2, generative, panen, dan bera. Selanjutnya menghitung indeks petanaman dan produktifitas dengan rentang waktu pengambilan data Januari, April, Agustus, November, Desember pada tahun 2019 dan 2020.

c. Pelatihan Petugas Input Data Digital di LAPAN

Pelaksanaan pelatihan input data digital di LAPAN menggunakan data citra landsat 8 dengan aplikasi *earthengine* dari google dan ArcGIS.



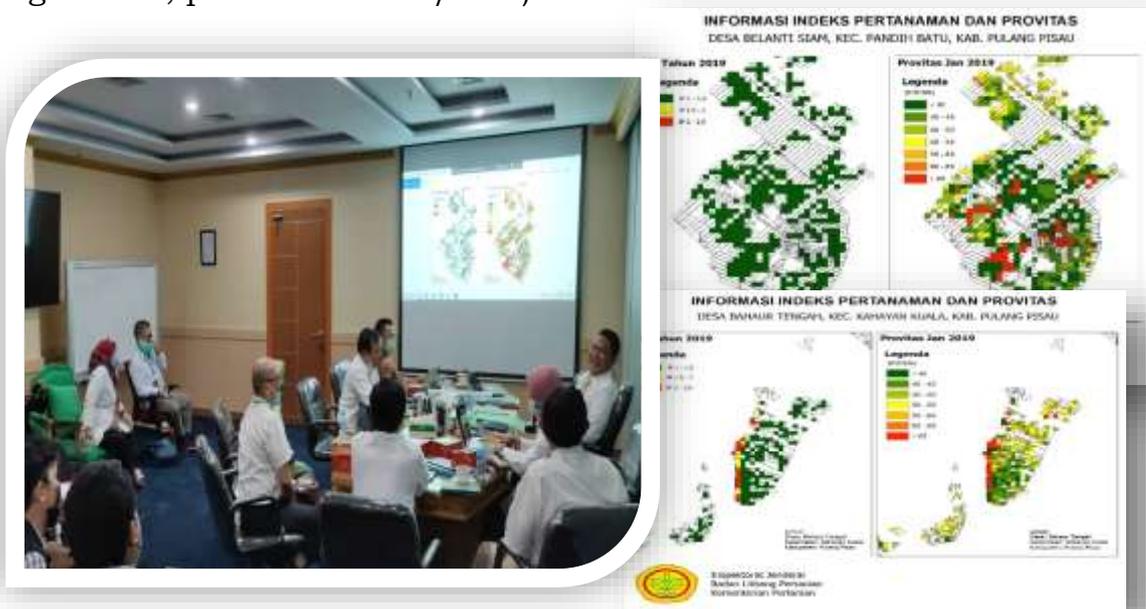
Gambar 14. Pelatihan Petugas Input Data Digital

d. Koordinasi dan sinkronisasi data digital dengan Stakeholders

Dalam rangka mendukung Monitoring dan Audit Digital diperlukan koordinasi dan sinkronisasi data dengan peta topografi digital pada Badan Informasi Geospasial.

e. Deliniasi Area Provitas IP dan Luas Tanam

Deliniasi area provitas IP dan Luas Tanam berdasarkan respon spektra dari object citra dilakukan dengan cara mengidentifikasi area untuk membuat *data Land Surface Temperature (LST)*, Produktivitas Padi dan *Perpendicular Drought Index (PDI)* pada 6 kabupaten yang melaksanakan kegiatan *Food Estate* dan Perluasan Areal Tanam Baru (PATB). Data *Land Surface Temperature (LST)* menyajikan informasi terkait perubahan suhu permukaan tanah menggunakan deliniasi *land cover* dengan interest olah tanah, tanam (vegetatif 1, vegetatif 2, generatif, panen dan bera/bero).



Gambar 15. Pemaparan Hasil Deliniasi Area

f. Pemaparan Prototype

Pemaparan prototype dilaksanakan oleh Tim Aplikasi dengan menyajikan gambaran aplikasi meliputi user, modul, dan fitur yang telah dibuat kepada mentor dan pelaksana proper dalam rangka mendapatkan masukan/perbaikan aplikasi sesuai dengan tujuan program perubahan yang dilaksanakan.



Gambar 16. Pemaparan Prototype

g. Melakukan *Ground Check*

Ground check dilaksanakan dalam rangka melakukan pengumpulan data sesuai kondisi riil di lapangan dan sekaligus pengujian atas implementasi aplikasi sebagai sarana penyimpanan data dan dokumentasi hasil lapangan. *Ground check* dilaksanakan di lokasi Kegiatan Food Estate dan PATB.



Gambar 17. Pelaksanaan Ground Check

4.1.8. Penyusunan Pedoman Monitoring dan Audit Digital

Salah satu perangkat kebijakan yang disusun dalam menjalankan proyek perubahan adalah Pedoman Monitoring dan Audit Digital (*draft*) melalui aplikasi Amouras. Pedoman tersebut digunakan sebagai acuan bagi auditor dalam melaksanakan monitoring dan audit berkelanjutan secara digital. Adapun tahapan yang dilakukan dalam menyusun Pedoman sebagai berikut:

a. Rapat Koordinasi Persiapan Penyusunan Draft Pedoman

Dalam rapat koordinasi persiapan penyusunan draft pedoman, Tim Aplikasi memberikan penjelasan kepada Tim Efektif untuk menyamakan persepsi bagaimana operasional aplikasi Amouras, sehingga dapat dituangkan dalam pedoman sebagai acuan dalam melaksanakan monitoring dan audit digital.

b. Konsinyering Penyusunan Pedoman

Dalam rangka penyusunan pedoman, Tim Efektif melakukan konsinyering untuk mempercepat proses penyusunan pedoman.

c. Pembahasan Draft Pedoman

Draft Pedoman yang telah disusun dibahas dalam rapat internal bersama antara Tim Efektif, *Project Leader*, dan auditor diluar Inspektorat 2 selaku *stakeholders* internal.

4.1.9. Sosialisasi Aplikasi Transformasi Monitoring dan Audit Digital

Dalam rangka sosialisasi aplikasi, ada beberapa strategi *marketing* yang dilakukan diantaranya berupa lomba logo Amouras. Melalui kegiatan lomba logo, diharapkan *stakeholders* lebih tertarik dan timbul rasa memiliki, sehingga lebih mudah untuk mendorong *stakeholders* dalam merealisasikan transformasi monitoring dan audit digital.

Sosialisasi juga dilakukan melalui workshop dan *focus group discussion* (FGD) dengan *stakeholders* internal Inspektorat 2, *stakeholders* eksternal yaitu Inspektorat 1, 3, 4, dan Inspektorat Investigasi, Inspektorat Jenderal Kementan.

Sosialisasi sekaligus *Soft Launching* aplikasi dilakukan di Hotel Sunan – Solo Jawa Tengah pada tanggal 12 Oktober 2020. Soft Launching sekaligus sosialisasi dihadiri oleh seluruh satker Dinas Pertanian lingkup Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian, baik yang hadir secara off line, maupun yang hadir secara virtual.



Gambar 18. Pelaksanaan Sosialisasi Aplikasi

4.1.10. Strategi Marketing Melalui Media Sosial

Salah satu strategi marketing yang dilakukan selain melakukan sosialisasi dengan stakeholder melalui pertemuan dan FGD, dilakukan juga sosialisasi melalui media online, sebagai berikut:



Gambar 19. Sosialisasi Melalui Media Online

4.1.11. Uji Coba Aplikasi

Uji coba aplikasi dilakukan secara bersama-sama oleh Tim Aplikasi dan Tim Efektif. Pelaksanaan input ke dalam aplikasi dari hasil pengumpulan data di lapangan dilaksanakan dalam rangka memastikan aplikasi dapat berfungsi sesuai tujuan dan fitur yang ditampilkan sesuai kebutuhan pelaksanaan pengawasan.

Berdasarkan hasil uji coba aplikasi dan hasil pembahasan draft pedoman yang dilakukan oleh Tim Efektif dan *Project Leader* diperoleh berbagai saran dan masukan guna menyempurnakan aplikasi. Pedoman dibuat dalam bentuk user manual.



Gambar 20. Pedoman Aplikasi AMOURAS

4.1.12. Penyusunan Kebijakan Pengawasan (*Draft*)

Implementasi audit dan monitoring digital akan membawa perubahan dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan yang ditindaklanjuti dengan perbaruan kebijakan pengawasan meliputi beberapa aspek antara lain: metode, ruang lingkup, waktu pelaksanaan, dan aspek lain yang terimplikasi dengan adanya aplikasi. Rancangan kebijakan pengawasan terlampir.

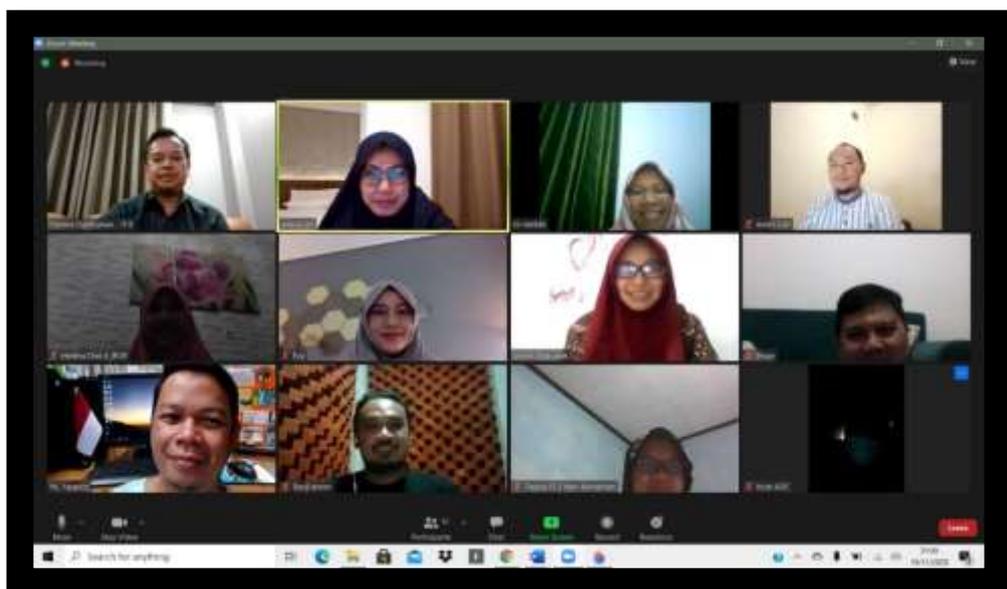


Gambar 21. Proses Penyusunan Kebijakan Pengawasan

4.1.13. Penyusunan Revisi Audit Charter (Draft)

Audit Charter Inspektorat Jenderal perlu dilakukan perubahan dikarenakan nomenklatur pada piagam audit terdahulu tidak sesuai dengan standar AAPII. Pembahasan rancangan revisi dilaksanakan dengan melibatkan jajaran pimpinan Inspektorat Jenderal sebagai pengambil kebijakan dan auditor yang digawangi oleh Asosiasi Auditor Internal Pemerintah Indonesia (AAPII) Itjen Kementan. Beberapa rancangan revisi audit charter meliputi:

- a. Visi, Misi dan Tujuan pada Draft Rancangan Audit Charter disesuaikan dengan Rencana Strategis Inspektorat Jenderal;
- b. Kewenangan Audit pada Piagam Audit ditambahkan sesuai dengan klausul dalam Permentan Nomor 50 Tahun 2018 pasal 5, pasal 6, serta penambahan klausul yang menyebutkan bahwa Auditor dapat melakukan pemeriksaan dan terhadap pihak eksternal yang terkait dengan satker (auditi) yang sedang diperiksa;
- c. Tanggung Jawab Audit pada Piagam Audit ditambahkan sesuai dengan klausul dalam Permentan Nomor 50 Tahun 2018 serta wewenang untuk meminta dukungan data dan informasi serta asistensi kepada pihak eksternal Kementerian Pertanian; dan
- d. Beberapa rancangan perubahan lain yang relevan dengan perkembangan kegiatan pengawasan saat ini.



Gambar 22. Pembahasan Draft Revisi Permentan Audit Charter

4.1.14. Sosialisasi Pedoman

Sosialisasi pedoman dilaksanakan dengan melibatkan auditor Inspektorat Jenderal sebagai penerima manfaat dalam mendukung pelaksanaan kegiatan pengawasan dan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan serta Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.



Gambar 23. Sosialisasi Pedoman Monitoring dan Audit Digital

4.1.15. Pendaftaran Aplikasi ke Pusdatin

Dalam rangka pengembangan audit dan monitoring menggunakan alat penginderaan jauh secara otomatis, permohonan fasilitasi kepada Pusdatin dalam rangka memperoleh *server hosting* dan telah diterbitkan ijin akses VPN melalui portal SSO.

Gambar 24. Ijin Akses Server Hosting

4.1.16. Launching AMOURAS

Lounching Aplikasi AMOURAS merupakan milestone tambahan (milestones baru) yang diusulkan Penguji saat Seminar Rancangan Proyek Perubahan. Launching dapat dilakukan dengan dihadiri Mentor dan Coach pada tanggal 27 Nopember 2020 di Ruang Rapat SPI Gedung B Lantai 2. Adapun dokumentasi launching sebagai berikut:



Gambar 25. Launching Aplikasi AMOURAS

4.1.17. Pendaftaran Hak Cipta

Agar Aplikasi Amouras terjaga orisinalitasnya, maka dilakukan pendaftaran Hak Cipta di lakukan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada Direktorat Kekayaan Intelektual pada tanggal 30 November 2020. Adapun dokumentasinya sebagai berikut:



Gambar 26. Pendaftaran Hak Cipta Aplikasi AMOURAS

4.2. Pelaksanaan Kegiatan Milestone Jangka Menengah dan Panjang

Tabel 4. Milestones Jangka Menengah dan Jangka Panjang

NO	Tahapan Utama	Tahapan Rinci	OUTPUT	WAKTU
1	Penandatanganan Kesepakatan Penggunaan Apikasi	Penandatanganan Kesepakatan Penggunaan Apikasi	MoU	Des-20
2	Pengesahan Kep Irjen Tentang Jakwas	Pengesahan Kep Irjen Tentang Jakwas	Jakwas	Des-20
3	Input data dalam Aplikasi	Proses Input progress pelaksanaan Program	Update aplikasi	Des-20
4	Implementasi Aplikasi Pada Program Prioritas	Progress Pelaksanaan Program termonitor berkala	Notulen	
JANGKA PANJANG				
1	Aplikasi Monitoring and Audit Digital Terintegrasi dengan seluruh Program Kementan	a. Pengembangan koneksitas data antar Program	Update aplikasi	Des-21
		b. Pengembangan aplikasi pada seluruh program	Update aplikasi	Des-21
2	Implementasi monit dan digital audit pd seluruh program Kementan	Monitoring dan audit dapat dilakukan real time	Laporan	Jan-22

NO	Tahapan Utama	Tahapan Rinci	OUTPUT	WAKTU
1	Penandatanganan Kesepakatan Penggunaan Aplikasi	Penandatanganan Kesepakatan Penggunaan Aplikasi	MoU	Des-20
2	Pengesahan Kep Irjen Tentang Jakwas	Pengesahan Kep Irjen Tentang Jakwas	Jakwas	Des-20
3	Input data dalam Aplikasi	Proses Input progress pelaksanaan Program	Update aplikasi	Des-20
4	Implementasi Aplikasi Pada Program Prioritas	Progress Pelaksanaan Program termonitor berkala	Notulen	
1	JANGKA PANJANG Aplikasi Monitoring and Audit Digital Terintegrasi dengan seluruh Program Kementan	a. Pengembangan koneksitas data antar Program	Update aplikasi	Des-21
		b. Pengembangan aplikasi pada seluruh program	Update aplikasi	Des-21
		2	Implementasi monit dan digital audit pd seluruh program Kementan	Monitoring dan audit dapat dilakukan real time

BAB V

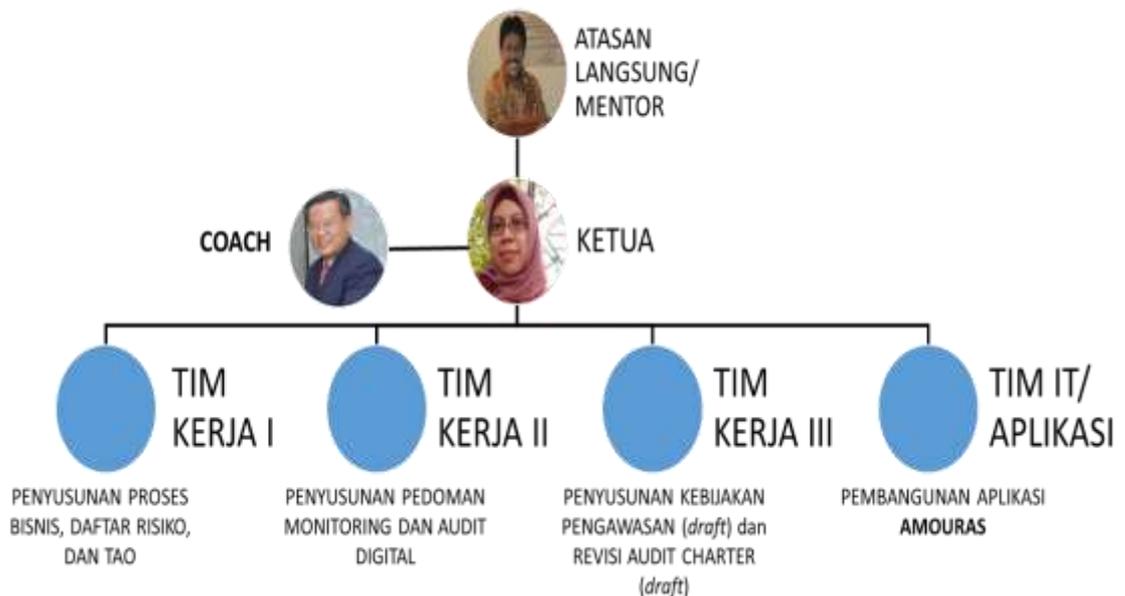
PENGELOLAAN SUMBERDAYA

5.1. Sumberdaya Kebijakan

Dalam melaksanakan implementasi proyek perubahan diperlukan sumberdaya kebijakan untuk mendukung suksesnya proyek perubahan. Beberapa sumberdaya kebijakan yang digunakan, yaitu: 1) SK Irjen tentang Pembentukan Tim Efektif dan Tim Aplikasi; 2) SK Irjen tentang Pedoman pelaksanaan Monitoring dan Audit Digital; 3) SK Irjen tentang Kebijakan Pengawasan (*draft*), dan Revisi Kepmentan terkait Audit Charter (*draft*).

5.2. Sumberdaya Manusia

Dalam pelaksanaan proyek perubahan diperlukan tim kerja yang digambarkan dalam struktur sebagai berikut:



Gambar 27. Organisasi Proyek Perubahan

Pembagian tugas dalam tim dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Tim Kerja I: Tim Kerja I bertugas melakukan penyusunan proses bisnis, menyusun daftar risiko, dan menyusun *Tentative Audit Objective* (TAO).

2. Tim Kerja II: Tim Kerja II bertugas melakukan penyusunan Pedoman Monitoring dan Audit Digital.
3. Tim Kerja III: Tim Kerja III bertugas melakukan penyusunan kebijakan pengawasan (*draft*) dan Revisi *Audit Charter* (*draft*).
4. Tim Kerja IV: Tim Kerja IV bertugas membangun aplikasi Amouras.

5.3. Anggaran

Dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi Inspektorat Jenderal guna menghasilkan hasil audit yang berkualitas diperlukan dukungan anggaran yang memadai. Untuk itu pada tahun 2021 anggaran di Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian meningkat, dari semula tahun 2020 Rp79 milyar, menjadi Rp164 milyar (tahun 2021), diantaranya digunakan untuk pengembangan aplikasi dengan memanfaatkan data-data citra saterit berbayar sehingga lebih cermat akurasi.

5.4. Sarana Prasarana

Sarana dan prasarana memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung aktivitas kegiatan pengawasan. Untuk itu tahun 2021 Inspektorat Jenderal Kemnetrian berupaya terus meningkatkan sarana dan prasarana guna sebagai salah satu upaya peningkatan kinerja auditor dan karyawan Itjentan pada umumnya.

BAB VI

STRATEGI KOMUNIKASI DAN MANAJEMEN STAKEHOLDERS

6.1. Strategi Komunikasi

Strategis komunikasi merupakan alat dan cara (seni dan ilmu) untuk merumuskan, melaksanakan dan mengevaluasi strategi suatu organisasi berbasis pada dialog dan pelibatan stakeholders. Dalam strategis komunikasi berarti komunikasi yang dilakukan sepenuhnya konsisten dengan misi, visi, dan nilai-nilai organisasi sehingga mampu meningkatkan *'positioning'* strategis dan daya bersaing (*competitiveness*) dengan organisasi-organisasi lain.

Dalam rangka implementasi transformasi monitoring dan audit digital beberapa strategi komunikasi yang dilakukan, yaitu:

- a. Mengkomunikasikan maksud dan tujuan adanya rencana transformasi dalam pelaksanaan monitoring dan audit lingkup Itjen Kementan secara jelas.
- b. Membangun kesamaan persepsi yang solid pada tingkatan pimpinan, baik dengan Inspektur Jenderal selaku Mentor, maupun dengan Inspektur lainnya selaku stakeholders eksternal.
- c. Fokus kepada kekuatan Inspektorat II dan memberikan upaya penguatan melalui selebrasi/pengakuan dari pihak-pihak Eselon 1 atau unit lain sebagai stakeholders eksternal untuk menjadi mitra dalam pelaksanaan perubahan.
- d. Melakukan pembagian tugas tim yang jelas
- e. Mendorong inovasi dan kreatifitas
- f. Membangun hubungan yang baik dengan seluruh auditor Inspektorat II maupun Auditor diluar Inspektorat II dan mengupayakan meningkatkan ketahanan dalam menghadapi tantangan.

Salah satu upaya strategi komunikasi dalam menyukseskan implementasi Transformasi Monitoring dan Audit Digital lingkup Inspektorat Jenderal Kementan, *Project Leader* melakukan analisis

SOAR (Strength, Opportunities, Aspirations, dan Results) sehingga dapat diperoleh strategi bagaimana transformasi monitoring dan audit digital dapat diwujudkan secara bertahap.



Gambar 28. Analisis SOAR Transformasi Monitoring dan Audit Digital

6.2. Manajemen Stakeholders

Pelaksanaan proyek perubahan dimulai dari identifikasi para *stakeholders* yang berkepentingan dan memiliki pengaruh terhadap kelancaran pelaksanaan proyek perubahan Transformasi Monitoring dan Audit Digital Dalam Mitigasi Risiko Pelaksanaan Program Kementerian Pertanian.

Stakeholders yang terlibat dalam pelaksanaan proyek perubahan dikelompokkan menjadi 2 (dua), yaitu:

6.2.1. Internal

Stakeholders internal atau pemangku kepentingan yang berasal dari dalam Kementerian Pertanian adalah sebagai berikut:

1. Plt Inspektur Jenderal Kementan berperan dalam memberikan arahan dan membangun komitmen seluruh pegawai Inspektorat Jenderal Kementan untuk mendukung monitoring dan audit digital dalam mitigasi risiko pelaksanaan program lingkup Kementan, serta menetapkan kebijakan atau perangkat teknis dalam melaksanakan proyek perubahan.

2. Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementan memiliki keterlibatan tinggi dalam memberikan dukungan anggaran, data, dan informasi untuk pelaksanaan proyek perubahan.
3. Auditor Inspektorat II, Inspektorat Jenderal Kementan berperan dalam membantu *Project Leader* untuk mewujudkan gagasan proyek perubahan.
4. Auditor Inspektorat I, III, IV, dan Inspektorat Investigasi

6.2.2. Eksternal

Stakeholders *eksternal* atau pemangku kepentingan yang berasal dari luar yang memiliki pengaruh terhadap pelaksanaan proyek perubahan, sebagai berikut:

1. Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian
2. Direktur Perluasan dan Perlindungan Lahan
3. Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
4. Direktur Serealia
5. Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Lahan Pertanian
6. Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian Kementerian Pertanian
7. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
8. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
9. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)

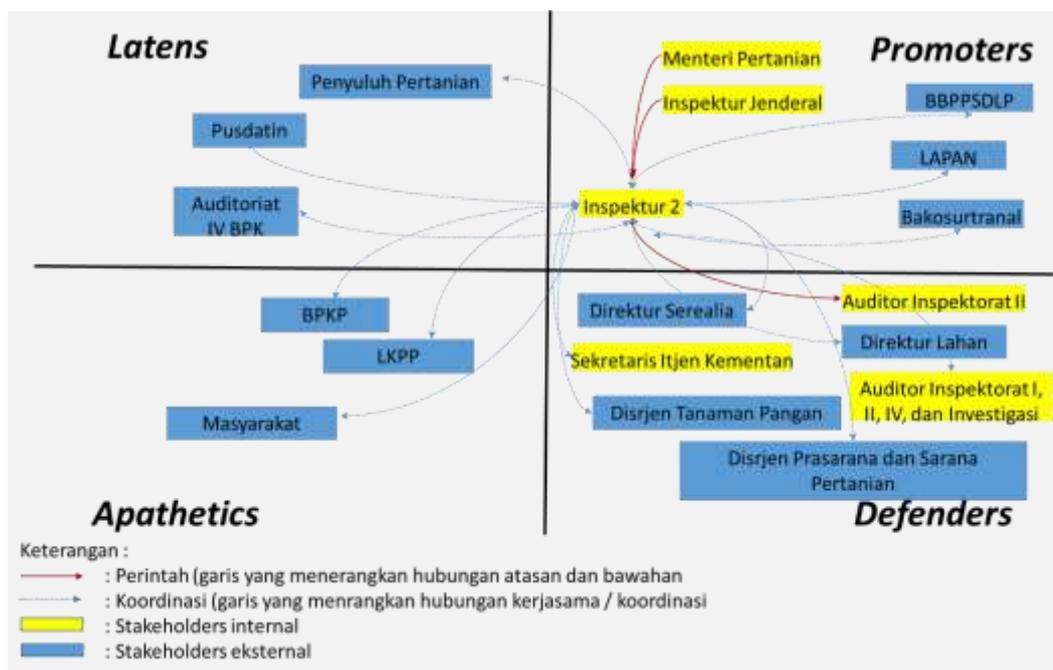
Hasil identifikasi *stakeholders* dilakukan untuk mengetahui penempatan posisi *stakeholders* baik internal dan eksternal sehingga dapat mudah menganalisis dan memahami seberapa besar pengaruh *stakeholders* dalam proyek perubahan ini. Analisis *stakeholders* dilakukan dengan menggunakan matrik/kuadran kelompok berdasarkan tingkat pengaruh dan kepentingannya, sebagai berikut:

1. Promotors, memiliki kepentingan besar terhadap proyek perubahan dan juga kekuatan untuk membantu membuatnya berhasil.
2. Defendents, memiliki kepentingan pribadi dan dapat menyuarakan dukungannya dalam komunitas, tetapi kekuatannya kecil untuk mempengaruhi proyek perubahan.

3. Latents, tidak memiliki kepentingan khusus maupun terlibat dalam proyek perubahan, tetapi memiliki kekuatan besar untuk mempengaruhi proyek perubahan jika mereka menjadi tertarik.
4. Apathetics, kurang memiliki kepentingan maupun kekuatan, bahkan mungkin tidak mengetahui adanya proyek perubahan.

Analisis stakeholders yang tepat dapat digunakan untuk menyusun peta jejaring kerja (*net-working map*) yang membuat pola hubungan kerja antar *stakeholders*. Setelah mendapatkan hasil analisis *networking map* dapat diketahui sudut pandang *stakeholders* terhadap proyek perubahan, *stakeholders* yang akan mendukung dan menolak, serta tingkat ketertarikan dan pengaruh *stakeholders* terhadap proyek perubahan.

Peta jejaring kerja para pemangku kepentingan disajikan dalam gambar berikut.



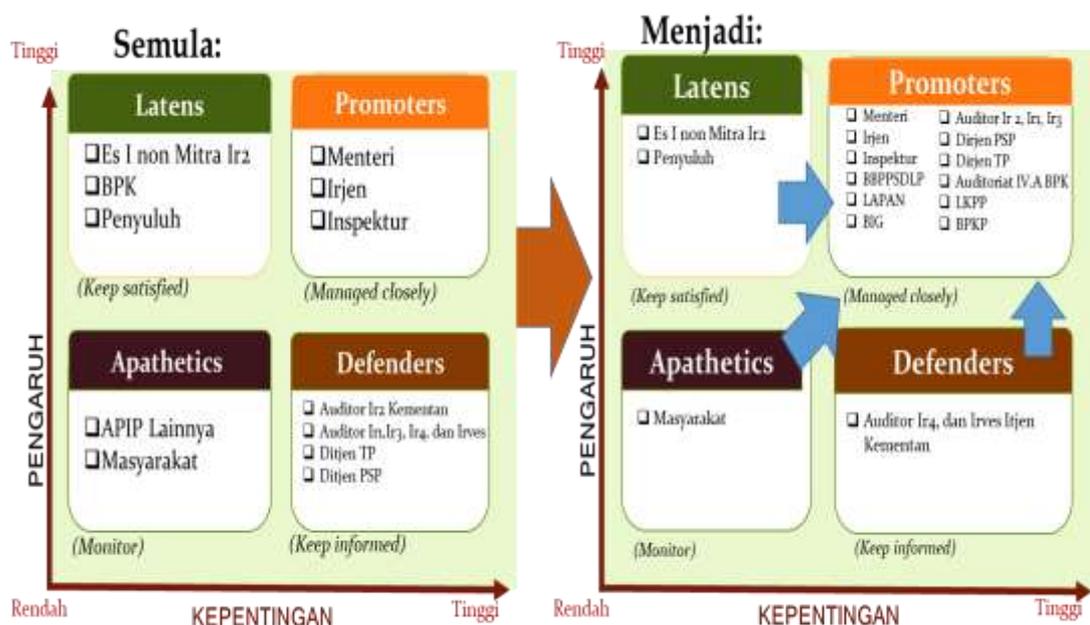
Gambar 29. Peta Jejaring Kerja (*networking map*) Stakeholders

Dari peta jejaring kerja dapat dilihat bahwa proyek perubahan ini memiliki banyak *stakeholders*. Setelah dilakukan kegiatan implementasi proyek perubahan, terdapat beberapa pergeseran positif, sehingga terjadi perubahan kedudukan *stakeholders* dalam hal ketertarikan

(*interest*) dan pengaruh (*influence*). BBPPSDLP yang merupakan Eselon I diluar mitra Inspektorat II, semula berada pada kudran *Latens* meningkat menjadi *Promoters*. Hal ini menunjukkan bahwa pada awalnya kurang memiliki ketertarikan dalam transformasi monitoring dan audit digital, namun setelah dilakukan penjelasan, bahkan bersedia memberikan supporting data untuk memperlancar pelaksanaan transformasi monitoring dan audit digital.

Demikian pula dengan Badan Pemeriksa Keuangan, khususnya Auditoriat IV.A selaku pemeriksa eksternal, yang semula berada pada kuadran *Latens* meningkat menjadi *Promoters*. Sesuai dengan arahan dan harapan yang disampaikan Kepala Auditoriat IV.A, dengan transformasi monitoring dan audit digital berbasis spasial, maka Itjen bersama Eselon I Penanggungjawab Kegiatan dapat berperan maksimal dalam pengendalian intern, *risk* dan *control* dapat dimitigasi dengan cepat, sehingga BPK selaku pemeriksa eksternal dapat melaksanakan post audit lebih mudah.

Sedangkan Dirjen Tanaman Pangan, Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian, yang semula berada pada kuadran *Defenders* meningkat menjadi *Promoters*. Pergeseran tersebut disajikan dalam gambar berikut:



Gambar 30. Peta Perubahan Kedudukan Stakeholders

BAB VII

STRATEGI DIALOG DAN PEMASARAN ATAS PROYEK PERUBAHAN

Proyek perubahan yang akan dilaksanakan melibatkan stakeholder, baik internal maupun eksternal, baik pusat maupun daerah dan akan membawa pengaruh bagi stakeholder. Pengaruh-pengaruh tersebut dapat berupa pengaruh positif maupun negatif yang dapat menghambat tujuan proyek perubahan. Rencana strategis dalam rangka mendapat dukungan maksimal dari stakeholder antara lain melalui sosialisasi keunggulan proyek perubahan yang dapat memberikan manfaat bagi stakeholder yaitu: pelaksanaan pembangunan pertanian dan penggunaan anggaran dapat dimonitor secara baik dan benar serta akuntabilitas kinerja dapat dipertanggungjawabkan.

Proyek perubahan yang akan dilaksanakan melibatkan stakeholder, baik internal maupun eksternal, baik pusat maupun daerah dan akan membawa pengaruh bagi stakeholder. Rencana strategis dalam rangka mendapat dukungan maksimal dari stakeholder antara lain melalui sosialisasi keunggulan proyek perubahan yang dapat memberikan manfaat bagi stakeholder yaitu: pelaksanaan pembangunan pertanian dan penggunaan anggaran dapat dimonitor secara baik dan benar serta akuntabilitas kinerja dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, melakukan identifikasi kebutuhan stakeholder dalam pengembangan proyek perubahan. Sedangkan strategi marketing dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 31. Konsep 4 P 1 C dalam Strategi Marketing Sektor Publik Proyek Perubahan

BAB VIII

FAKTOR KUNCI KEBERHASILAN

Dalam proyek perubahan ini, beberapa faktor kunci keberhasilan yang ditetapkan, yaitu:

1. Identifikasi Risiko dan Mitigasi Pelaksanaan Kegiatan *Food Estate* lingkup Ditjen Prasana dan Sarana Pertanian dan Kegiatan Perluasan Areal Tanam Baru lingkup Ditjen Tanaman Pangan telah di sepakati dengan Berita Acara.
2. Prototype aplikasi Monitoring dan Audit Digital yang kami beri nama AMOURAS telah dibuat.
3. Pedoman monitoring dan audit digital (draft) telah disusun
4. Kebijakan Pengawasan (draft) telah disusun.

Selain factor kunci keberhasilan, telah diidentifikasi faktor-faktor pendukung dalam pencapaian keberhasilan proyek perubahan ini, yaitu:

1. Tersedianya data risiko dan mitigasinya untuk setiap program lingkup Kementan.
2. Komitmen dari Pimpinan unit Eselon I untuk mendukung menyediakan data dan informasi yang diperlukan.
3. Dukungan data dan informasi spasial dari lembaga yang berwenang, dalam hal ini Bakosurtranal dan LAPAN.
4. Sumberdaya yang memadai dalam pelaksanaan monitoring dan audit digital lingkup Itjen Kementan.

Sedangkan output kunci merupakan hal utama yang akan dicapai dalam proyek perubahan, secara detail jenis output, deskripsi, dan capaiannya diuraikan dalam Tabel 5 berikut.

Tabel 5. Capaian Output Kunci

Output	Deskripsi	Capaian
1. Kesepakatan Daftar Risiko dan Mitigasi Risiko Program lingkup Ditjen TP dan Ditjen PSP	Daftar Risiko dan Mitigasi Risiko yang disepakati dengan Eselon I PJ Program merupakan risiko yang akan dilakukan monitoring dan audit secara digital dan berkelanjutan.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Berita Acara Kesepakatan thd Daftar Risiko dan Mitigasi Risiko Kegiatan Food Estate dan PATB

2. Aplikasi monitoring dan audit digital AMOURAS.	Merupakan aplikasi pelaksanaan monitoring dan audit digital lingkup Kementerian Pertanian	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Aplikasi AMOURAS dapat diakses ml : http://amouras.itjen.pertanian.go.id
3. Pedoman Monitoring dan Audit Digital.	Merupakan pedoman teknis bagi seluruh <i>stakeholders</i> internal Inspektorat Jenderal dalam melakukan monitoring dan audit digital.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peraturan Irjen tentang Pedoman Monitoring dan Audit Digital ▪ Video Tutorial : https://drive.google.com/file/d/1zjyTvN02xGMC/CXa8zdbcbxaAxxnJr10Fo/view?usp=sharing
4. Kebijakan Pengawasan (<i>draft</i>).	Merupakan payung hukum dalam melaksanakan monitoring dan audit digital bagi auditor lingkup Itjen Kementerian Pertanian	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peraturan Irjen tentang Kebijakan Pengawasan
5. Revisi Permentan tentang Audit Charter (<i>draft</i>)	Merupakan payung hukum dalam melaksanakan monitoring dan audit digital bagi Eselon 1 lingkup Itjen Kementerian Pertanian	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Revisi Permentan tentang Audit Charter (<i>draft</i>)

BAB IX

KENDALA, RISIKO, DAN SOLUSI

Dari beberapa hal yang telah diidentifikasi berpotensi menjadi kendala dalam pelaksanaan proyek perubahan ini, risiko, dan strategi penyelesaian kendala yang telah diprediksi pada awal pelaksanaan proyek perubahan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6. Kendala, Risiko, dan Solusi

No	Uraian	Uraian
1	Kendala	<ul style="list-style-type: none"> a. Infrastruktur pendukung berupa <i>hardware</i>, <i>software</i>, dan <i>brainware</i> belum sepenuhnya dibangun di semua tingkatan pelaksana baik di Pusat maupun daerah; b. Belum semua auditor memiliki kompetensi yang sama dalam pemahaman proses bisnis Program lingkup Kementan; c. Akses data terhadap pelaksanaan program lingkup Kementan dari perencanaan sampai dengan pelaporan yang masih terbatas;
2	Risiko	<ul style="list-style-type: none"> a. Informasi dan sumber data belum terdokumentasi ke dalam basis data sehingga audit/monitoring secara digital berpotensi tidak dapat dioperasionalkan; b. Digitalisasi data di lapangan tidak lengkap dan tidak tepat waktu sehingga proses audit/monitoring terhambat;
3	Solusi	<ul style="list-style-type: none"> a. Membangun sistem informasi teknologi yang terintegrasi dengan perangkat pelaporan mitra pelaksana Program lingkup Kementan. b. Peningkatan penguasaan <i>soft skill</i> maupun intra personal skill, integritas, kompetensi, networking dan sertifikasi. c. Meningkatkan pemahaman terhadap proses bisnis Program lingkup Kementan sebagai implementasi IT dalam memperoleh data yang obyektif, representatif, teliti, tepat waktu, dan konsisten. d. Pendekatan melalui kegiatan pengawalan/ pembinaan SPIP yaitu dengan mendorong terbangunnya pengendalian intern pada satker pelaksana kegiatan, sehingga risiko-risiko pelaksanaan Program lingkup Kementan dapat dicegah dan diminimalisir dampak yang ditimbulkan.

Selain itu dalam pelaksanaan proyek perubahan, terdapat beberapa kendala-kendala internal maupun eksternal. Adapun kendala tersebut sebagai berikut:

a. Kendala Internal

- 1) Waktu yang singkat, sulit mengatur waktu pertemuan intensif dengan Tim Efektif, karena benturan dengan pekerjaan rutin, sehingga dapat berakibat penyelesaian pekerjaan tidak sesuai jadwal yang telah ditetapkan
- 2) Keterbatasan SDM dan infrastruktur pendukung berupa *hardware*, *software*, dan *brainware*
- 3) Belum semua auditor memiliki kompetensi yang sama dalam pemahaman proses bisnis Program lingkup Kementan
- 4) Aplikasi Amouras tidak sesuai dengan harapan

b. Kendala Eksternal

- 1) Sulit mengatur waktu pertemuan dengan pihak eksternal, karena masing-masing pihak eksternal memiliki kesibukan.
- 2) Penolakan dari pihak stakeholders akibat tidak ada persamaan persepsi atas implementasi transformasi monitoring dan audit digital.
- 3) Akses data terhadap pelaksanaan program dari perencanaan sampai dengan pelaporan yang masih terbatas.

Untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan proyek perubahan ini dilakukan berbagai strategi antisipasi untuk memberikan keyakinan akan keberhasilan pembangunan aplikasi monitoring dan audit digital. Dukungan penuh dari pimpinan, baik di Inspektorat Jenderal maupun dari *stakeholders* yaitu Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian dan Direktur Jenderal Tanaman Pangan selaku mitra kerja Inspektorat 2 akan memberikan dampak yang signifikan terhadap keberhasilan implementasi proyek perubahan ini. Beberapa strategi yang dilakukan dalam mengatasi kendala antara lain:

a. Jangka Pendek

- 1) Membangun komunikasi dan koordinasi yang intensif, baik secara formal maupun informal dengan *stakeholders*.
- 2) Melakukan pendekatan kepada pihak-pihak terkait akan pentingnya dukungan terhadap rencana proyek perubahan.

- 3) Memantau secara terus menerus perkembangan hasil pelaksanaan tugas Tim Efektif dengan melakukan pertemuan secara rutin dan terjadwal sesuai kesepakatan, baik secara offline maupun online.
- 4) Melakukan koordinasi dan sinkronisasi data dengan pihak-pihak terkait seperti LAPAN, Badan Informasi dan Geospasial, Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Lahan Pertanian (BPSDLP), sehingga aplikasi yang dibangun dapat memenuhi ekspektasi yang diharapkan.

b. Jangka Menengah

- 1) Melakukan sosialisasi dan *focus group discussion* terkait penggunaan aplikasi AMOURAS termasuk sosialisasi Pedoman Monitoring dan Audit Digital.
- 2) Membangun sistem informasi teknologi yang terintegrasi dengan perangkat pelaporan Eselon I mitra pelaksana Program lingkup Kementan.
- 3) Meningkatkan pemahaman terhadap proses bisnis Program lingkup Kementan sebagai implementasi IT dalam memperoleh data yang obyektif, representatif, teliti, tepat waktu, dan konsisten.
- 4) Pendekatan melalui kegiatan pengawalan/pembinaan SPIP untuk mendorong terbangunnya pengendalian intern pada satker pelaksana kegiatan, sehingga risiko-risiko pelaksanaan Program lingkup Kementan dapat dicegah dan diminimalisir dampak yang ditimbulkan.

c. Jangka panjang

- 1) Bekerjasama dengan Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Lahan Pertanian (BPSDLP) untuk memberikan support data spasial terhadap semua kegiatan yang dilakukan oleh Eselon I mitra kerja Inspektorat 2.
- 2) Peningkatan penguasaan soft skill maupun intra personal skill, integritas, kompetensi, networking dan sertifikasi.
- 3) Melakukan pendekatan kepada Biro Perencanaan akan pentingnya dukungan anggaran untuk melakukan transformasi pelaksanaan monitoring dan audit dari konvensional menjadi digital dalam mitigas risiko pelaksanaan program kementerian Pertanian.

BAB X

LESSON LEARNED KEPEMIMPINAN

Dalam rangka mewujudkan tujuan dari proyek perubahan, ditemukan beberapa *lesson learned* antara lain:

- a. Keterbukaan antar *stakeholders* yang didasarkan pada saling percaya (*trust*) akan memudahkan penyelesaian masalah dalam rangka mewujudkan proyek perubahan,
- b. Koordinasi yang intensif dengan pihak-pihak terkait, membantu proyek perubahan dapat diselesaikan sesuai jadwal yang direncanakan.
- c. Komitmen dari pimpinan dan seluruh jajaran di Inspektorat Jenderal Kementan serta mitra kerja Inspektorat 2 merupakan unsur paling penting yang mendukung terwujudnya Transformasi Monitoring dan Audit Digital secara efektif dan efisien.

BAB XI

MEMBANGUN ORGANISASI PEMBELAJAR

Bagi organisasi Inspektorat Jenderal, adanya transformasi metode pengawasan dari konvensional menjadi digital melalui pembangunan aplikasi Amouras, menunjukkan bahwa Inspektorat Jenderal merupakan organisasi pembelajar, yaitu organisasi yang mampu untuk terus menerus melakukan proses pembelajaran mandiri (*self learning*) sehingga organisasi tersebut memiliki 'kecepatan berpikir dan bertindak' dalam merespon beragam perubahan yang muncul.

Aplikasi *monitoring and audit digital* diharapkan mampu secara real time mendeteksi sekaligus melakukan mitigasi risiko sehingga setiap risiko penyimpangan dapat diketahui lebih dini sebagai *early warning*, sehingga tujuan program dapat tercapai dengan akuntabilitas yang dapat dipertanggung-jawabkan.

Tabel 7. Organisasi Pembelajar

No.	KEGIATAN	OUTPUT	WAKTU	PIC	KETERANGAN
1	Coffee Morning	Hasil Evaluasi Kinerja	Okt 2020 s.d Juni 2021	Pengendali Mutu Subbag TU	2 mingguan
2	Jumat Sehat	Badan Bugar dan Sehat	Okt 2020 s.d Juni 2021	Seluruh ASN Ir2	setiap jumat pagi
3	Sosialisasi dalam rangka sharing vision	Persamaan Persepsi dan Dukungan	Okt - Des 2020	Pengendali Mutu	Satker Pelaksana Program
4	Pelatihan di Kantor Sendiri (PKS)	Peningkatan Kompetensi Auditor	Okt 2020 s.d Juni 2021	Pengendali Mutu	2 mingguan
5	Bimtek analisis data citra untuk auditor	Peningkatan Kompetensi Auditor	Jan - Feb 2021	Bagian OKHH	semua auditor
6	Bimtek Inputing Data	Peningkatan Kompetensi Petugas Daerah	Jan - Feb 2021	Bagian OKHH	Petugas Data Kabupaten
7	Gelar Temuan Hasil Audit	Temuan Final	Okt 2020 s.d Juni 2021	Pengendali Tekni	Setiap Tim Audit
8	Lomba Auditor Milenial	Peningkatan Kompetensi	Jan - Des 2021	Bagian OKHH	setiap 6 bulan
9	Penilaian Kinerja 360°	Hasil Penilaian Kinerja	Des-20	Inspektur	setiap 6 bulan
10	"Tour of duty" bagi auditor	Penyegaran pengalaman	Jan-21	Sesstjen	Setiap 2 tahun disertai dengan Hasil Penilaian 360°

Berikut di sajikan beberapa photo pendukung Kegiatan Manajemen Organisasi Pembelajar di Inspektorat II:

PKS Pembahasan PKP PATB



Gelar Temuan Hasil Audit



Jumat Sehat - Senam



Bimtek



Pelatihan Penggunaan drone Untuk Pemetaan Lahan



Gambar 32. Kegiatan Manajemen Organisasi Pembelajar Inspektorat II

BAB XII

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

12.1. Kesimpulan

Kesimpulan dalam proyek perubahan *Transformasi Monitoring dan Audit Digital dalam Mitigasi Risiko Pelaksanaan Program Kementerian Pertanian*” sebagai berikut:

- a. Inspektorat Jenderal sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) di Kementerian Pertanian memiliki peran yang sangat strategis dalam mendukung keberhasilan pembangunan pertanian antara lain memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah. Kegiatan pengawasan Inspektorat Jenderal selama ini berbasis data manual, yang memiliki beberapa kelemahan dalam pelaksanaan pengawasan, sehingga digitalisasi data pengawasan menjadi solusi terbaik.
- b. Proyek perubahan “*Transformasi Monitoring dan Audit Digital dalam Mitigasi Risiko Pelaksanaan Program Kementerian Pertanian*” merupakan salah satu upaya yang diharapkan mampu meningkatkan kualitas pengawasan dengan memanfaatkan teknologi informasi modern, sehingga memungkinkan auditor menghasikan laporan audit secara berkala tanpa harus menunggu proses audit di akhir periode anggaran. Proses audit berjalan secara simultan bersamaan dengan eksekusi kegiatan yang dilakukan. Metode ini juga diharapkan menjadi early warning bagi manajemen berupa informasi awal tentang masalah yang terjadi, penyebab hakiki, serta solusi yang dapat ditempuh. Hal tersebut menjadi penting dimasa pandemi covid-19 karena keterbatasan sumber daya sedangkan kebutuhan penyediaan informasi dalam rangka pengambilan keputusan harus dilakukan dengan cepat.
- c. Output dalam proyek perubahan ini adalah terbangunnya aplikasi *Monitoring dan Digital Audit* berbasis tabular dan spasial yang diberi nama **AMOURAS**, yaitu *Audit and Monitoring Using Remote Sensing*

Tool Trough Automatic System, sedangkan *outcome* yang ingin dicapai adalah dikembangkannya aplikasi pada seluruh program strategis Kementerian Pertanian sehingga kegiatan monitoring dan audit di Inspektorat Jenderal atas kegiatan/program mitra kerja dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

- d. Bagi organisasi Inspektorat Jenderal, adanya transformasi metode pengawasan dari konvensional menjadi digital melalui pembangunan aplikasi AMOURAS, menunjukkan bahwa Inspektorat Jenderal merupakan organisasi pembelajar (*learning organization*), yaitu organisasi yang mampu untuk terus menerus melakukan proses pembelajaran mandiri (*self learning*) sehingga organisasi tersebut memiliki 'kecepatan berpikir dan bertindak' dalam merespon beragam perubahan yang muncul.
- e. Proyek perubahan yang dilaksanakan melibatkan berbagai pihak, baik internal maupun eksternal, pusat maupun daerah, dan menyertakan pula perubahan perilaku dan budaya kerja sehingga pelaksanaannya dibagi menjadi 3 (tiga) tahap, yaitu jangka pendek dengan rentang waktu 2 (dua) bulan, jangka menengah dengan rentang waktu 6 (enam) bulan dan jangka panjang dengan rentang waktu 12 (dua belas) sampai dengan 24 (dua puluh empat) bulan. Ruang lingkup perubahan yang ingin dicapai sebagai berikut:
 - 1) Tersusunnya pedoman dan terbangunnya aplikasi pelaporan data pencapaian progres pelaksanaan setiap tahapan proses bisnis Program lingkup Kementan.
 - 2) Aplikasi berbasis tabular dan spasial atas realisasi anggaran dan fisik Program lingkup Kementan.
 - 3) Sistem pelaporan data yang terintegrasi dengan aplikasi pengawasan Inspektorat Jenderal.
- f. Mengingat proyek perubahan ini dilakukan untuk memecahkan permasalahan organisasi Inspektorat Jenderal yang menghadapi keterlambatan data dan informasi terkait progress pelaksanaan kegiatan dan minimnya cakupan monitoring dan audit. Maka pembuatan aplikasi Monitoring dan Digital Audit dalam Rangka Mitigasi Risiko Pelaksanaan Program lingkup Kementan

(AMOURAS) diharapkan sebagai inisiasi dan proyek percontohan untuk selanjutnya diterapkan pada seluruh program strategis Kementerian Pertanian.

12.2. Rekomendasi

Terhadap hasil pelaksanaan proyek perubahan *Transformasi Monitoring dan Audit Digital dalam Mitigasi Risiko Pelaksanaan Program Kementerian Pertanian*” direkomendasikan sebagai berikut:

- a. Milestone jangka menengah dan panjang yang telah ditetapkan agar segera dilaksanakan oleh seluruh pihak terkait.
- b. Penyediaan alokasi anggaran untuk sewa citra berbayar sehingga akurasi data lebih tinggi.

Dukungan dari Mentor/Atasan Langsung:

Assalamu'alaikum wr. wb.

Saya mengucapkan selamat dan memberikan dukungan penuh kepada Ibu Tin Latifah, Inspektur II Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian yang telah menyelesaikan proyek perubahan dengan judul **Transformasi Monitoring dan Audit Digital dalam Mitigasi Risiko Pelaksanaan Program Kementerian Pertanian** melalui aplikasi AMOURAS. Dari aspek kepemimpinan Ibu Tin Latifah telah menghasilkan inovasi baru dan mengimplementasikan dengan capaian output sesuai isi tahapan yang telah diutarakan dan dapat dikembangkan untuk monitoring dan audit pelaksanaan program kementerian lainnya. Sukses Bu Tin. Wassalamu'alaikum wr.wb



Dukungan Stakeholders



DR. Ir. Suwandi, M.Si
Dirjen Tanaman Pangan



DR. Sarwo Edhi, SP. MM
Dirjen PSP



Padang Pamungkas, ST., MM
Kepala Auditoriat IV BPK-RI



Yalianto, ST., MT
Direktur e-catalog LKPP



Dr. Husnain, M.Sc
Kepala BBSDLP
Badan Litbang Pertanian



Ir. Agus Tauhid, MM
Kadistan Provinsi Banten



Ir. Husnul Fauzi, M.Si
Kadistan Provinsi NTB



Ir. Novly G. Wowling, M.Si
Kadis Pertanaka
Provinsi Sulut

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Rancangan Proyek Perubahan (*soft files terpisah*)
- Lampiran 2. Bukti Pelaksanaan Implementasi Proyek Perubahan Jangka Pendek Milestone 1 (*soft files terpisah*)
- Lampiran 3. Bukti Pelaksanaan Implementasi Proyek Perubahan Jangka Pendek Milestone 2 (*soft files terpisah*)
- Lampiran 4. Bukti Pelaksanaan Implementasi Proyek Perubahan Jangka Pendek Milestone 3 (*soft files terpisah*)
- Lampiran 5. Bukti Pelaksanaan Implementasi Proyek Perubahan Jangka Pendek Milestone 4 (*soft files terpisah*)
- Lampiran 6. Bukti Pelaksanaan Implementasi Proyek Perubahan Jangka Pendek Milestone 5 (*soft files terpisah*)
- Lampiran 7. Bukti Pelaksanaan Implementasi Proyek Perubahan Jangka Pendek Milestone 6 (*soft files terpisah*)
- Lampiran 8. Bukti Pelaksanaan Implementasi Proyek Perubahan Jangka Pendek Milestone 7 (*soft files terpisah*)
- Lampiran 9. Bukti Pelaksanaan Implementasi Proyek Perubahan Jangka Pendek Milestone 8 (*soft files terpisah*)
- Lampiran 10. Bukti Pelaksanaan Implementasi Proyek Perubahan Jangka Pendek Milestone 9 (*soft files terpisah*)
- Lampiran 11. Bukti Pelaksanaan Implementasi Proyek Perubahan Jangka Pendek Milestone 10 (*soft files terpisah*)
- Lampiran 12. Bukti Pelaksanaan Implementasi Proyek Perubahan Jangka Pendek Milestone 11 (*soft files terpisah*)
- Lampiran 13. Bukti Pelaksanaan Implementasi Proyek Perubahan Jangka Pendek Milestone 12 (*soft files terpisah*)
- Lampiran 14. Bukti Pelaksanaan Implementasi Proyek Perubahan Jangka Pendek Milestone 13 (*soft files terpisah*)
- Lampiran 15. Bukti Pelaksanaan Implementasi Proyek Perubahan Jangka Pendek Milestone 14 (*soft files terpisah*)
- Lampiran 16. Bukti Pelaksanaan Implementasi Proyek Perubahan Jangka Pendek Milestone 15 (*soft files terpisah*)
- Lampiran 17. Bukti Pelaksanaan Implementasi Proyek Perubahan Jangka Pendek Milestone 16 (*soft files terpisah*)
- Lampiran 18. Bukti Pelaksanaan Implementasi Proyek Perubahan Jangka Pendek Milestone 17 (*soft files terpisah*)